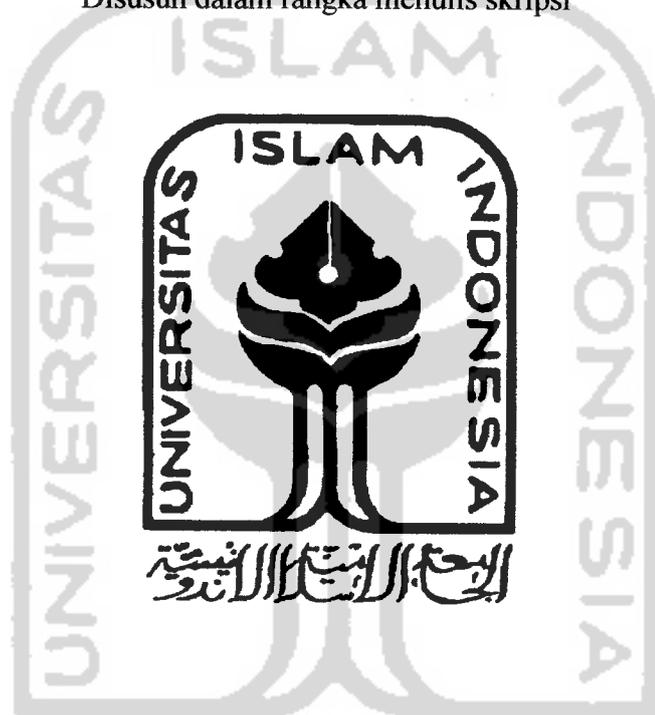


**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN DEMAK DALAM
MENGHADAPI OTONOMI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka menulis skripsi



Oleh :

Nama : Pajar Nugraha
Nomor Mahasiswa : 02313058
Program studi : I. E. S. Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN DEMAK DALAM
MENGHADAPI OTONOMI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata I

Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Pajar Nugraha

Nomor Mahasiswa : 02313058

Program studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

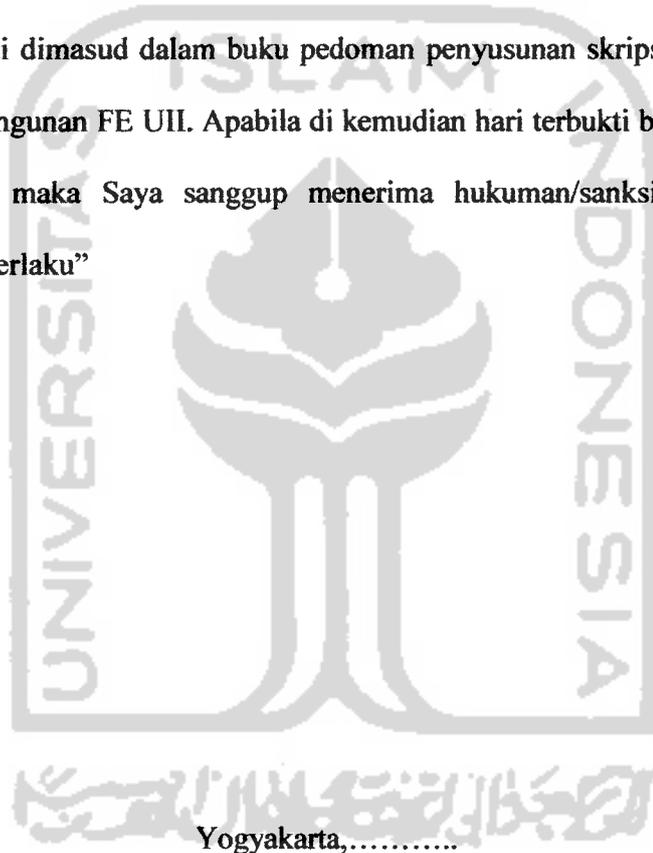
FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimasud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”



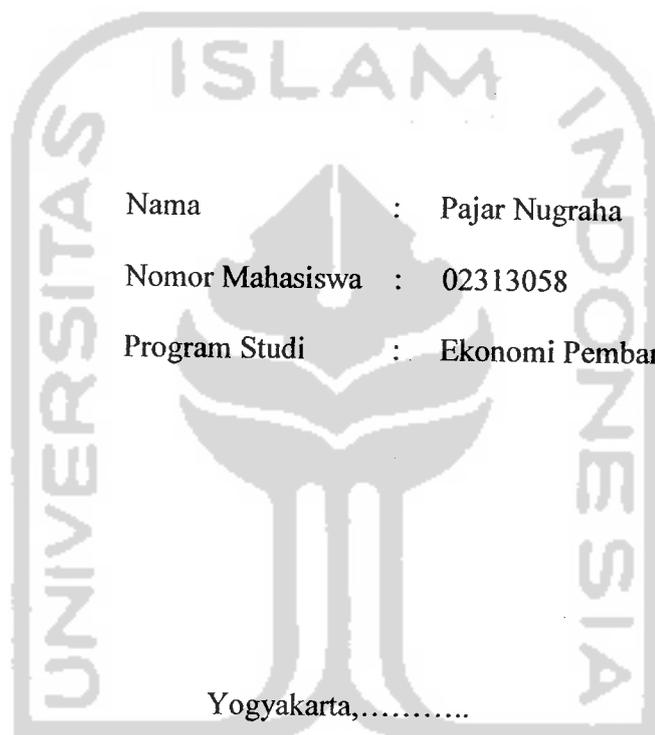
Penulis,

Pajar Nugraha

PENGESAHAN

Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak Dalam Menghadapi Otonomi

Daerah Tahun Anggaran 2003



Nama : Pajar Nugraha

Nomor Mahasiswa : 02313058

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,.....

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sarastri Mumpuhi R', written over a faint watermark of the UII logo.

Dra. Sarastri Mumpuhi R, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2003

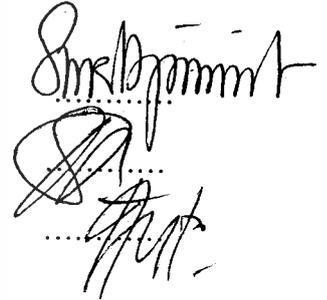
Disusun Oleh: PAJAR NUGRAHA
Nomor mahasiswa: 02313058

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 10 Oktober 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Sarastri Mumpuni R,M.Si

Penguji I : Drs. Suharto, M.Si

Penguji II : Drs. Moh. Bekti Hendrie Anto, M.Sc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

MOTTO

“Dan ketahuilah bahwa hanya kepada Tuhanmu lah segala akan berakhir.

Dialah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis”

(Al – Qur’an; An – Najm: 42-43)

“Persaingan kehidupan yang tidak sehat akan membuat kamu lalai,

Sampai kamu masuk liang kubur.

Jangan berbuat demikian, kamu kelak akan mengetahuinya.

Sekali mlagi jangan demikian, kamu sungguh akan mengetahuinya.”

(Al-Qur’an; At-Takaatsur: 1-4)

KATA PENGANTAR

Assalammu'Alaikum Wr.Wb

Maha Suci ALLAH, Alkhamdulillah rabbal'alamin. Tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain ALLAH SWT dan Dialah dzat yang Maha Agung. Berkat keridhoanNya serta kasih sayang yang tiada duanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tanpa kemudahan dan keridhoanNya mustahil skripsi ini akan selesai tepat pada waktunya. Demikian dengan penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan penuh pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia merupakan berkat Rahmat dan Anugerah Yang Maha Kuasa.

Skripsi ini berjudul "Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten Demak Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2003" adalah suatu analisis yang menerangkan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah dengan melihat dari besarnya Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Posisi Fiskal daerah yang diteliti.

Kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menyelesaikan penelitian ini semoga ALLAH SWT memberikan barokhah pada mereka dan semoga penulisan skripsi ini berguna bagi semua pembaca

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Sarastri Mumpuni R, Dra, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang berkenan dan penuh kebijaksanaan memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Mulyono, SE dan Ny. Nenny Darwanty selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, mendo'akan, memberikan dorongan serta memberikan kasih sayangnya yang tulus kepada penulis.
3. Adikku Damar Hidayat yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta kasih sayangnya kepada penulis.
4. Bapak H. Sofyan, SE selaku Kassubbag Bendaharawan Kantor Dinas BPKKD Kabupaten Demak, yang telah memberi data-data yang berkenaan dengan penelitian ini.
5. Staff dan Karyawan Kantor Dinas BPKKD yang dengan kesabaran dan kerendahan hati membantu penulis dalam mencari data.
6. Imma Pagiastuti yang telah sabar memberi nasehat, semangat dan menunggu penulis sampai skripsi ini selesai.
7. Teman – teman EP-02; Andie, Adam, Budi, Burhan, Erlin manis yang selalu mendukungku , gugun, irawan, Irfan, sisdianto, Noppa, serta anak – anak EP-02 yang tidak saya sebutkan, terima kasih atas dukungan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Indra Prasetya, yang telah mengantar penulis dalam mendapatkan data-data skripsi ini.

9. Anak – anak Kontrakan “ SINGO EDAN PUTU LAWU”; Bendhot, Agro, Wisnu, Pitpot, Dik Tit, serta Satrio yang telah menjadi keluarga kecil selama studi di Yogyakarta.
 10. Teman-teman KKN Angkatan 30 Unit 32: Bayu, Andy, Woro, Rosy, Romy, Yayenk, Udin, Uuz, Didi, Via, terima kasih sudah banyak mendukung penulis dalam melaksanakan tugas sebagai Kordus di Unit.
 11. Anak-anak TKCI-Toyota Kijang Club Indonesia di Semarang ; Rino, Astrid, Natalia, Djohan, gak lupa buat si manis Dian, “maju terus guys”.
 12. Mbak Vonny, bendahara Honda Jazz Club Semarang yang selama ini selalu menjadi teman seperjuangan TKCI dengan semua *event* unggulan di Jl. Pahlawan.
 13. Omega Soundwork Barito Semarang, terima kasih buat kerja kerasnya dalam memanjakan telinga penulis dengan musik dung...dungnya..di mobil ku.
- Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menambah pengalaman dan cakrawala berfikir penulis pada khususnya, dan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya pada umumnya. Semoga skripsi ini mendapat *Ridha* ALLAH SWT. Amien.

Wassalammu' Alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,.....2006

Penulis,

Pajar Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar lampiran.....	xvi
Halaman Abstrak.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tinjauan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Sistematika Penelitian.....	17

BAB II. SUBYEK PENELITIAN.....	19
2.1. Profil Kabupaten Demak.....	19
2.2. Bidang Pemerintahan.....	20
2.2.1. Legislatif.....	20
2.2.2. Peternakan.....	20
2.2.3. Catatan Sipil.....	21
2.3. Kependudukan.....	21
2.4. Fertilitas dan Mortalitas.....	22
2.5. Bidang Keuangan Daerah.....	23
2.6. Bidang Pendapatan Regional.....	29
2.6.1. PDRB Kabupaten Demak.....	29
2.6.2. Perkembangan PDRB dan PDRB PerKapita.....	29
2.6.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Demak.....	30
2.6.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
BAB III. KAJIAN PUSTAKA.....	37
3.1. Penelitian Yulianti.....	37
3.2. Penelitian Kifliansyah.....	38
3.3. Penelitian Jasagung Heriyadi.....	39
3.4. Penelitian Nataludin.....	40
3.5. Penelitian Sumodiningrat.....	40
3.6. Penelitian Mardiasmo.....	41
3.7. Penelitian Koswara.....	41

3.8. Penelitian Paul Hersney dan Kenneth Blanchard.....	42
3.9. Penelitian Husnan dan Suwarsono.....	42
3.10. Penelitian Rizal Sudjarwan.....	42
BAB IV. LANDASAN TEORI.....	44
4.1. Pembangunan Ekonomi.....	44
4.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	45
4.3. Otonomi Daerah.....	46
4.4. Dana Perimbangan.....	50
4.5. Desentralisasi dan Keuangan Daerah.....	50
4.6. Pendapatan Asli Daerah.....	55
4.7. Pinjaman Daerah.....	56
4.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.....	58
4.9. Tujuan Hubungan Keuangan Pusat – Daerah.....	59
BAB V. METODE PENELITIAN.....	62
5.1. Data yang diperlukan.....	62
5.2. Metode Analisis.....	62
5.2.1. Analisis Kualitatif.....	62
5.2.2. Analisis Kuantitatif.....	63
5.3. Definisi Operasional.....	63
5.4. Alat – alat Analisis Data.....	65
5.4.1. Derajat Desentralisasi fiskal.....	65
5.4.2. Kebutuhan Fiskal.....	66

5.4.3. Kapasitas Fiskal.....	66
5.4.4. Upaya/Posisi Fiskal.....	67
BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	68
6.1. Derajat Desentralisasi Fiskal.....	68
6.2. Kebutuhan Fiskal.....	70
6.3. Kapasitas Fiskal.....	72
6.4. Upaya Fiskal.....	74
BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	75
7.1. Simpulan.....	75
7.2. Implikasi.....	76
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran.....	80

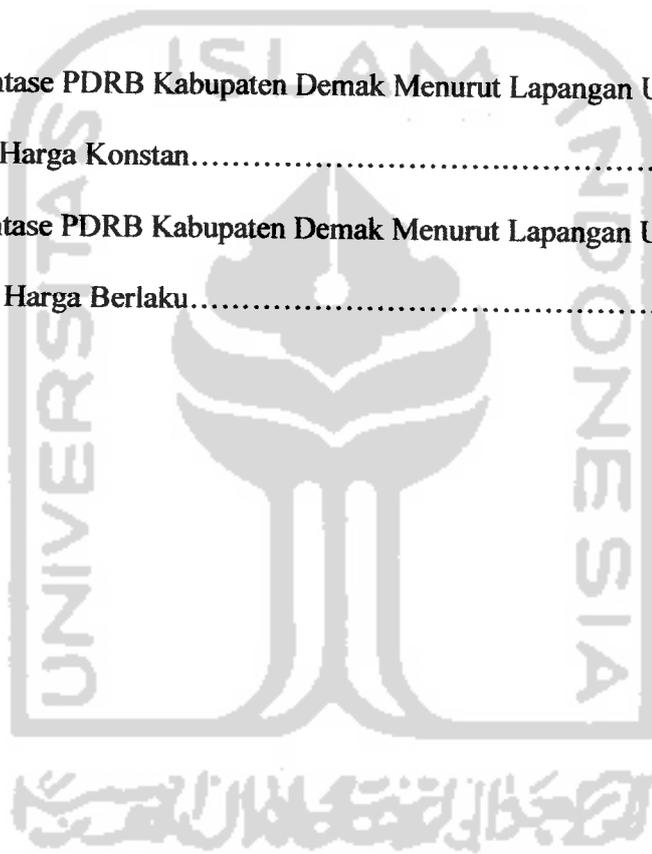


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Dana Alokasi Umum tiap-tiap Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2003.....	7
1.2. Dana Alokasi Umum Tiap-tiap Kabupaten/Kota di Bawah Nilai Rata-rata Total DAU Se Jawa Tengah Tahun 2003.....	8
1.3. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Demak.....	12
2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2004.....	25
2.2. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 Kabupaten Demak.....	26
2.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2004 Kabupaten Demak.....	34
2.4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2004 Kabupaten Demak.....	35
2.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Kabupaten Demak Tahun 2002- 2004 Dalam Persen.....	36

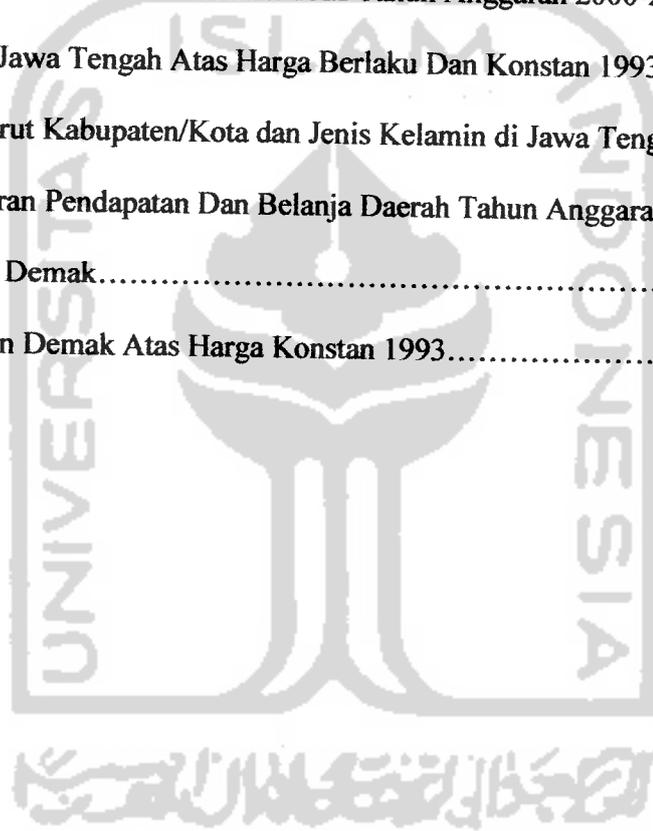
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Demak Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 Atas dasar Harga Konstan.....	32
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Demak Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 Atas Dasar Harga Berlaku.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Realisasi Penerimaan Daerah Otonom TK.I Tahun Anggaran 2000- 2003.....	80
Realisasi Pengeluaran Daerah Otonom TK.I Tahun Anggaran 2000-2003.....	83
PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Harga Berlaku Dan Konstan 1993.....	84
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah, 2003.....	85
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Demak.....	86
PDRB Kabupaten Demak Atas Harga Konstan 1993.....	89



ABSTRAKSI

Desentralisasi Fiskal pada dasarnya mewujudkan suatu wilayah yang mandiri dan mampu menghadapi otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya masih terjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam mengelola keuangannya. Banyaknya perbedaan pada sisi keuangan antara Kabupaten/Kota se Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih perlu peran aktif pemerintah pusat dalam menutup pembiayaan belanja daerah yaitu dengan menyalurkan Dana Alokasi Umum. Besarnya Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terjadinya ketergantungan fiskal pusat-daerah. Banyaknya DAU yang di salurkan melihat dari luasnya suatu Kabupaten/Kota, jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota, jika luas wilayah dan jumlah penduduk besar maka ketergantungan kepada pemerintah pusat juga besar.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Perkembangan perekonomian dunia berlangsung dengan cepat dan bersifat global, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang melanda Indonesia cukup baik, hal ini disebabkan karena dampak positif dari globalisasi serta adanya iklim yang menarik bagi pertumbuhan usaha di dalam negeri sebagai dampak dari berbagai kebijakan deregulasi dan hal ini tercermin dalam APBD dimana penerimaan dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak ganda yaitu dampak positif dan dampak negatif. Krisis tersebut telah membawa dampak berupa peningkatan kemiskinan, stabilitas perekonomian yang kurang, dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK, di sisi lain krisis tersebut membawa manfaat tersembunyi bagi upaya meningkatkan taraf hidup rakyat di masa yang akan datang yaitu dengan terbukanya jalan bagi reformasi total di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah di setiap Kotamadya maupun Kabupaten di seluruh propinsi. Dengan diberlakukan otonomi daerah ini diharapkan terjadi pembangunan ekonomi yang lebih baik serta terjadi keadilan dalam hal pemerataan pembangunan. Membangun suatu daerah diperlukan dukungan finansial dan potensi daerah yang dimiliki.

Tidak berarti bahwa daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya akan mengendur kegiatan pembangunan dan ekonominya. Hanya saja daerah yang miskin harus menyesuaikan diri untuk mengoptimalkan potensi *non natural resources*. Sebagai contoh, suatu kabupaten bisa memunculkan orientasi baru pembangunannya, seperti mengembangkan diri menjadi daerah industri, pusat perdagangan, pariwisata, atau mengembangkan industri jasa tertentu yang sesuai dengan potensi lokal. Untuk mendukung pembangunan daerah dibutuhkan adanya investasi yang lebih banyak, baik yang berasal dari pemerintah daerah sendiri maupun dari pihak swasta. Hal demikian akan dapat terjadi jika daerah bersifat proaktif menarik investor, baik dengan memberikan insentif tertentu maupun melalui penyediaan infrastruktur yang membuat pemilik dana mau menginvestasikan modalnya. Kebijakan reformasi total yang dikeluarkan pemerintah yaitu menyangkut hubungan pemerintah pusat ke daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan ini diwujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia yang diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan

partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dapat terlaksana melalui penyediaan sumber – sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan (Undang – undang republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Menurut pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Otonomi daerah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal

dan memberi keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, tetapi apakah setiap daerah mampu membiayai pembangunan daerah sendiri yang hanya mengandalkan pendapatan lokal? Hal ini tentu saja tidak mungkin oleh karena itu pemerintah daerah membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dan perimbangan. Yang terdiri dari:

1. bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan sumber daya alam;
2. dana alokasi umum; dan
3. dana alokasi khusus.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati – hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Rizal Sujarwan, 2002). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU RI No. 33 Tahun 2004). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, keduanya tersebut merupakan sarana untuk menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran keuangan Pemerintah Daerah serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam menentukan pembangunan daerah otonom. Tahun

2002 merupakan tahun kali pertama otonomi daerah terealisasi. Realisasi penerimaan propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Lampiran hal. 85 yang memperlihatkan jumlah penerimaan keuangan Jawa Tengah tahun 2003 sebesar Rp 2.864.241.347.000,00. Kemampuan propinsi Jateng dalam meningkatkan penerimaan keuangannya dari pengeluaran yang sebesar Rp 2.433.606.983.000,00 didukung dengan perkembangan PAD dalam penerimaan daerah terdiri dari:

1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagian Pendapatan dari Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi.
4. Pinjaman Pemerintah Daerah.

Kemampuan daerah otonom dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sistem desentralisasi masa sekarang ini ternyata masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat besarnya dana perimbangan yang disalurkan pada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah yang termasuk dalam Dana Perimbangan antara lain:

1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Perimbangan dari propinsi.

Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbeda-beda besarnya. Dari ke – 35 Kabupaten/Kota tersebut masih memerlukan sumbangan dari pemerintah pusat guna membiayai pembangunan daerahnya. Berikut daftar besarnya DAU yang disalurkan ke Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 (Tabel. 1). Diantara ke-35 Kabupaten/Kota terdapat satu Kabupaten yang tidak menerima DAU yaitu Kabupaten Grobogan. Terbaca dengan jelas bahwa ternyata semua Kabupaten/Kota se Jawa Tengah masih memerlukan sumbangan dari Pemerintah Pusat yang nilainya berbeda-beda antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain. Terjadi peningkatan besarnya sumbangan yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari tahun 2002 ke tahun 2003. Kabupaten Demak mendapatkan DAU dibawah nilai rata-rata dari total DAU se Jawa Tengah. Besarnya DAU yang diterima Kabupaten Demak sebesar Rp 245.940.000.000,00 (Tabel 1.2). Selain Kabupaten Demak terdapat 16 Kabupaten/Kota yang menerima DAU dibawah nilai rata-rata dari total DAU se Jawa Tengah antara lain: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga , Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Tabel 1.1
Dana Alokasi Umum Tiap-tiap Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 - 2003

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	DAU (Rp 1.000)	
		2002	2003
Kab. Cilacap	2138,51	328 181 809	368 270 000
Kab. Banyumas	1327,59	321 924 056	381 941 933
Kab. Purbalingga	777,65	234 944 963	245 460 355
Kab. Banjarnegara	1069,74	215 477 413	248 820 000
Kab. Kebumen	1262,74	283 640 000	315 400 000
Kab. Purworejo	1034,82	225 780 000	269 059 878
Kab. Wonosobo	984,68	215 728 576	237 249 611
Kab. Magelang	1085,73	271 415 356	300 629 991
Kab. Boyolali	1015,07	250 946 369	292 070 000
Kab. Klaten	655,56	331 679 050	409 386 136
Kab. Sukoharjo	466,66	205 280 000	253 710 000
kab. Wonogiri	1822,37	253 974 331	311 090 000
Kab. Karanganyar	772,2	222 497 813	266 550 000
Kab. Sragen	946,49	238 900 000	271 940 000
Kab. Grobogan	1975,85	268 106 393	
Kab. Blora	1794,4	286 552 490	270 140 000
Kab. Rembang	1014,1	173 125 944	188 930 000
Kab. Pati	1491,2	268 120 528	300 900 000
Kab. Kudus	425,17	185 867 627	228 308 491
Kab. Jepara	1004,16	232 522 269	248 660 000
Kab. Demak	897,43	196 740 000	245 940 000
Kab. Semarang	946,86	215 290 000	258 283 871
Kab. Temanggung	870,23	106 510 000	221 660 000
Kab. Kendal	1002,27	286 810 000	270 560 000
Kab. Batang	788,95	212 735 650	224 887 875
Kab. Pekalongan	836,13	205 220 000	222 580 000
Kab. Pemalang	1011,9	250 279 318	297 359 580
Kab. Tegal	879,7	256 867 600	309 629 615
Kab. Brebes	1657,73	304 222 462	357 380 000
Kota Magelang	18,12	106 457 876	119 980 000
Kota Surakarta	44,03	178 390 000	232 341 997
Kota Salatiga	52,96	100 590 974	105 690 000
Kota Semarang	373,67	266 950 000	308 710 000
Kota Pekalongan	44,96	99 269 950	122 170 000
Kota Tegal	34,49	163 413 857	151 650 000

Tabel 1.2
Dana Alokasi Umum Tiap-tiap Kabupaten/Kota
Di Bawah Nilai Rata-Rata
Total DAU Se Jawa Tengah
TAHUN 2003
(Rp 1.000)

No	Kabupaten/Kota	DAU
1	Kabupaten Purbalingga	245 460 355
2	Kabupaten Banjarnegara	248 820 000
3	Kabupaten Wonosobo	237 249 611
4	Kabupaten Sukoharjo	253 710 000
5	Kabupaten Rembang	188 930 000
6	Kabupaten Kudus	228 308 491
7	Kabupaten Jepara	248 660 000
8	Kabupaten Demak	245 940 000
9	Kabupaten Semarang	258 283 871
10	Kabupaten Temanggung	221 660 000
11	Kabupaten Batang	224 887 875
12	Kabupaten Pekalongan	222 580 000
13	Kota Magelang	119 980 000
14	Kota Surakarta	232 341 997
15	Kota Salatiga	105 690 000
16	Kota Pekalongan	122 170 000
17	Kota Tegal	151 650 000

BPS Jawa Tengah, *Realisasi Penerimaan dan Belanja Tiap-tiap Kabupaten/Kota se Jawa Tengah*, 2003.

Desentralisasi dalam rangka kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu Kabupaten/Kota dalam hal membiayai pembangunannya masing-masing. Kabupaten Demak merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah yang masih memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah mewujudkan kemandirian dalam hal melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Secara langsung wilayah otonom berhak menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan wilayahnya. Besarnya Dana Alokasi Umum yang disalurkan dari pemerintah pusat ke daerah menunjukkan besarnya ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal membiayai belanja daerah. Kabupaten Demak termasuk daerah otonom yang masih membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum. Besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Demak sebesar Rp 245.940.000.000,00 dibawah nilai rata-rata DAU se Jawa Tengah yang sebesar Rp 260.509.980.382,35. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kabupaten Demak mampu menghadapi otonomi daerah jika meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan penerimaan dan mengurangi belanja daerah. Kabupaten Demak berada di antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara yang menerima DAU dibawah rata-rata DAU se Jawa Tengah. Realitas hubungan fiscal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya control pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap Total Pendapatan daerah disbanding dengan besarnya subsidi (*grants*) yang didrop dari pusat.

Indikator desentralisasi fiskal adalah ratio antara PAD dengan Total Pendapatan daerah. Kabupaten Demak memiliki ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat yaitu ditunjukkan dengan besarnya DAU yang diterima dari pemerintah pusat.

Secara garis besarnya untuk mengetahui lebih lanjut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja secara rinci dapat dilihat pada ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun 2003 (Tabel 1.3) dan Ringkasan Realisasi Belanja Tahun 2003 (Tabel 1.3. hal. 13). Total Penerimaan Pendapatan Kabupaten Demak mengalami peningkatan dari rencana anggaran yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 319.201.301.720,00 terealisasi sebesar Rp 327.518.002.152,00 sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 17.511.323.490,00 terealisasi menjadi RP 17.671.121.260,00. Pada pos Dana perimbangan yang sebelumnya direncanakan Rp 281.915.978.230,00 terealisasi sebesar Rp 289.942.431.653,00 yang terdiri dari BHPBP + DAK + DAU + Dana Perimbangan dari Propinsi. Kenaikan Total Penerimaan Kabupaten Demak yang sebelumnya pada tahun 2002 sebesar RP 246.309.477.729,00 mengalami kenaikan pada tahun 2003 sebesar RP 327.518.002.152,00 (Tabel 1.3. hal. 12). Dalam masa Desentralisasi saat ini Kabupaten Demak mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 245.940.000.000,00 dari pemerintah Pusat guna membiayai keuangan daerah, dengan demikian Kabupaten Demak masih menerima bantuan dari pemerintah Pusat yang cukup besar. Pada Pos Belanja Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Demak terinci sebagai berikut: Anggaran yang sebelumnya direncanakan sebesar RP 339.415.755.637,00 ternyata terealisasi sebesar

Rp 327.643.100.953,00 (Tabel 1.3. hal. 13). Perkembangan perekonomian Kabupaten Demak dipengaruhi oleh PDRB yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah. Pada tahun 2003 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan regional Kabupaten Demak atas harga berlaku tahun 1993, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tahun 2002 PDRB kabupaten Demak sebesar 2.407,32 milyar rupiah maka pada tahun 2003 sebesar 2.749,43 milyar rupiah, sedangkan untuk pendapatan regional atas harga konstan mengalami kenaikan sebesar 812,42 milyar rupiah di tahun 2003 yang sebelumnya sebesar 790,20 milyar rupiah pada tahun 2002. sementara itu selama kurun waktu dua tahun tersebut PDRB per kapita atas harga berlaku juga mengalami kenaikan dari 2.416.064 rupiah pada tahun 2002 menjadi 2.703.274 rupiah pada tahun 2003, begitu juga dengan PDRB perkapita atas harga konstan sebesar 793.071 rupiah pada tahun 2002 menjadi 798.778 rupiah di tahun 2003.

TABEL 1.3
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2003 KABUPATEN DEMAK
(Rp 1.000)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI ANGGARAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN	<u>319.201.301,720</u>	<u>327.518.002,152</u>	<u>8.316.700,432</u>	102.61%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	<u>17.511.323,490</u>	<u>17.671.121,260</u>	<u>159.797,770</u>	100.91%
1.1.1	Pajak Daerah	4,429,670,750	4,857,931,265	428,260,515	109.67%
1.1.2	Retribusi Daerah	7,755,513,740	7,350,203,487	(405,310,253)	94.77%
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	332,787,000	249,018,000	(83,769,000)	74.83%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4,993,352,000	5,213,968,508	220,616,508	104.42%
1.2	Dana Perimbangan	<u>281.915.978,230</u>	<u>289.942.431,653</u>	<u>8.026.453,423</u>	102.85%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11,782,647,630	19,165,601,959	7,382,954,329	162.66%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	245,940,000,000	245,940,000,000	-	100.00%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8,900,000,000	8,900,000,000	-	100.00%
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	15,293,330,600	15,936,829,694	643,499,094	104.21%
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>19.774.000,000</u>	<u>19.904.449,239</u>	<u>130.449,239</u>	100.66%
	Total Pendapatan	<u>319.201.301,720</u>	<u>327.518.002,152</u>	<u>8.316.700,432</u>	102.61%

Kantor Dinas BPKKD Kab. Demak

Tabel 1.3
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2003 KABUPATEN DEMAK
(Rp 1.000)

1	2	3	4	5	6
II	BELANJA	<u>339.415.755,637</u>	<u>327.643.100,953</u>	<u>(11.772.654,684)</u>	96.53%
2.1	APARATUR DAERAH	60,755,328,082	55,897,304,921	(4,858,023,161)	92.00%
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	45,222,395,445	41,957,291,224	(3,265,104,221)	92.78%
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	34,196,136,095	31,655,711,503	(2,540,424,592)	92.57%
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,782,107,150	5,261,487,813	(520,619,337)	91.00%
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,106,815,000	1,037,070,000	(69,745,000)	93.70%
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	1,707,837,200	1,670,324,523	(37,512,677)	97.80%
2.1.1.5	Belanja Lain-lain	2,429,500,000	2,332,697,385	(96,802,615)	96.02%
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	9,447,022,912	8,677,026,737	(769,996,175)	91.85%
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	2,064,364,062	1,627,033,869	(437,330,193)	78.82%
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,851,286,850	4,664,113,703	(187,173,147)	96.14%
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,600,165,000	1,468,645,500	(131,519,500)	91.78%
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	931,207,000	917,233,665	(13,973,335)	98.50%
2.1.3	Belanja Modal	6,085,909,725	5,262,986,960	(822,922,765)	86.48%
2.2	PELAYANAN PUBLIK	221,323,456,694	216,661,467,701	(4,661,988,993)	97.89%
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	140,168,605,944	135,804,277,337	(4,364,328,607)	96.89%
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	125,965,785,044	122,411,326,170	(3,554,458,874)	97.18%
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,190,928,900	8,415,672,923	(775,255,977)	91.56%
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	156,070,000	146,230,000	(9,840,000)	93.70%
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	1,683,822,000	1,712,812,244	28,990,244	101.72%
2.2.1.5	Belanja Lain-lain	3,172,000,000	3,118,236,000	(53,764,000)	98.31%
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	60,805,268,000	60,786,904,254	(18,363,746)	99.97%
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	5,278,113,500	5,036,957,452	(241,156,048)	95.43%
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,842,290,000	17,193,706,757	351,416,757	102.09%
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,146,001,300	1,202,264,000	56,262,700	104.91%
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	37,538,863,200	37,353,976,045	(184,887,155)	99.51%
2.2.3	Belanja Modal/Pembangunan	20,349,582,750	20,070,286,110	(279,296,640)	98.63%
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	29,815,417,080	29,479,148,331	(336,268,749)	98.87%
2.4	Belanja Tak Tersangka	27,521,553,781	25,605,180,000	(1,916,373,781)	93.04%
	Total Belanja	<u>339.415.755,637</u>	<u>327.643.100,953</u>	<u>(11.772.654,684)</u>	96.53%
	Surplus/(Defisit)	(20.214.453,917)	(125.098,801)	20.089.355,116	0.62%

Tabel 1.3
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2003 KABUPATEN DEMAK
(Rp 1.000)

1	2	3	4	5	6
III	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Daerah	<u>51.296.741,081</u>	<u>51.458.979,453</u>	<u>162.238,372</u>	100.32%
3.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	33,161,953,917	33,161,953,917	-	100.00%
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan				
3.1.3	Transfer dari Dana Depresiasi				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	1,531,500,000	1,746,950,000	215,450,000	114.07%
3.1.5	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.6	Pos Penerimaan PFK	16,603,287,164	16,550,075,536	(53,211,628)	99.68%
	Jumlah Penerimaan Daerah	<u>51.296.741,081</u>	<u>51.458.979,453</u>	<u>162.238,372</u>	100.32%
3.2	Pengeluaran Daerah	<u>31.082.287,164</u>	<u>51.333.880,652</u>	<u>20.251.593,488</u>	165.15%
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal	12,725,000,000	12,725,000,000	-	100.00%
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	20,304,805,116	20,304,805,116	
3.2.5	Pemberian Pinjaman	1,754,000,000	1,754,000,000	-	100.00%
3.2.6	Pos Pengeluaran PFK	16,603,287,164	16,550,075,536	(53,211,628)	99.68%
	Total Pengeluaran Pembiayaan	<u>31.082.287,164</u>	<u>51.333.880,652</u>	<u>20.251.593,488</u>	165.15%
	Pembiayaan Netto	<u>20.214.453,917</u>	<u>125.098,801</u>	<u>(20.089,355,116)</u>	0.62%

Struktur ekonomi Kabupaten Demak tahun 2002 – 2003 atas harga berlaku pertanian masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Demak yang rata – rata 48 persen setiap tahun dari total PDRB. Dari hasil perhitungan selama 2 tahun telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif, jika pada tahun 2002 pertumbuhan PDRB sebesar 2,76 persen, maka pada tahun 2003 tumbuh sebesar 2,81 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Demak mengalami kenaikan yang signifikan. Bersarnya Penerimaan Total yang diterima Kabupaten Demak pada Pendapatan Asli Daerah masih rendah bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum dari pusat ke Kabupaten Demak. Dengan demikian anggaran Pemerintah Daerah masih membutuhkan campur tangan Pemerintah Propinsi dalam hal pengalokasian Dana Perimbangan.

Latar belakang Kabupaten Demak diatas memberikan gambaran secara jelas dan didasarkan pada data yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai **“ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN DEMAK DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

(UU RI No.32 Tahun 2004). Dalam masa Desentralisasi sekarang ini peranan Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian yang membutuhkan kerja keras dalam mengatur Keuangan Daerah yang menentukan terciptanya kemandirian yang harus sesuai dengan UU RI No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang menghendaki terrealisasinya Otonomi Daerah. Maka penulis mengambil pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PAD terhadap struktur penerimaan APBD di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 dilihat dari besarnya Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, serta Posisi Fiskal?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat bantuan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan akan tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dari segi keuangan dalam menghadapi otonomi daerah tahun 2003.
2. Mengetahui besarnya bantuan pemerintah dalam segi keuangan untuk membiayai pengeluaran Kabupaten Demak Tahun 2003.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang dapat memberikan gambaran mengenai keterikatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, yang anatra lain:

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Indonesia.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Demak.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah pertumbuhan ekonomi.

1.5. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Objek Penelitian

Bab ini merupakan uraian, diskripsi, gambaran secara umum atas objek penelitian.

Bab III Kajian Pustaka

Teori yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV Landasan Teori

Berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

Bab V Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab VI Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian data dengan bantuan komputer dan pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis.

Bab VII Kesimpulan dan Saran

Bagian terakhir atau penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penulisan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1 Profil Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu Daerah Otonom di Propinsi Jawa

Tengah yang terletak pada:

Koordinat:

Lintang Selatan: $6^{\circ} 43' 26''$ - $7^{\circ} 09' 43''$

Bujur Timur : $110^{\circ} 27' 58''$ - $110^{\circ} 48' 47''$

Batas Wilayah:

Utara : Kabupaten Jepara, Laut Jawa.

Timur : kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan.

Selatan: Kabupaten Grobogan , Kabupaten Semarang.

Jarak Terjauh :

Barat ke Timur : 49 km

Utara ke Selatan : 41 km

2.2. Bidang Pemerintahan

Kabupaten Demak terbagi atas 14 kecamatan, 241 desa, dan 6 kelurahan, sedangkan menurut klasifikasinya wilayah demak terdiri atas 144 desa/kelurahan swadaya mula dan 96 swakarya mula. Selain itu menurut perkembangan LKMD, maka di Kabupaten Demak terdapat 29 desa berkategori II dan 218 desa berkategori III.

2.2.1. Legislatif

Banyaknya anggota DPR Kabupaten Demak hasil Pemilu 2004 masing – masing fraksi tahun 2004 adalah sebanyak 44 orang, terdiri dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) 11 orang, Fraksi PDI-P 15 orang, dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) 9 orang. Dari jumlah anggota tersebut dibagi menjadi beberapa komisi dengan Komisi A 11 orang, Komisi B 10 orang, Komisi C 10 orang dan Komisi D 10 orang. Selama tahun 2004 produk/keputusan yang telah diambil atau dikeluarkan oleh DPR Kabupaten Demak, antala lain: 12 Peraturan Daerah, 6 Keputusan DPRD, 19 Keputusan Pimpinan Dewan, 5 Keputusan Panitia Musyawarah, dan 10 Keputusan Panitia Anggaran.

2.2.2. Pertanahan

Selama tahun 2004, kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah berhasil menerbitkan 4.052 sertifikat hak atsa tanah. Dimana sebagian adalah hak milik (90,28%) dan hak guna bagunan (8,93%). Hasil ini lebih tinggi disbanding pada tahun sebelumnya yang berjumlah 3.707 sertifikat.

2.2.3. Catatan Sipil

Jumlah akte kelahiran dan kematian yang dihimpun oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak selama tahun 2004 sebanyak 16.772, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah akte kelahiran naik 849 buah (5,33 persen) dan akte kematian naik 4 buah (40,00 persen). Selain kedua akte tersebut juga ada akte salinan kelahiran 13 buah, akte perkawinan 38 buah, akte lain – lain 8 buah dan akte perceraian 3 buah.

2.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil Registrasi Penduduk 2004 adalah sebanyak 1.025.314 orang terdiri atas 507.581 laki-laki (49,50 persen) dan 517.773 perempuan (50,50 persen) (Tabel 2.1.). Jumlah penduduk ini naik sebanyak 8.239 orang atau sekitar 0,81 persen dari tahun sebelumnya.

Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang dengan jumlah penduduk sebesar 126.735 orang, 9.410 orang, dan 96.380 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kebonagung dan Kecamatan Gajah dengan masing-masing sebanyak 38.279 orang dan 46.393 orang.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 652.733 orang (63,66 persen), dan selebihnya 332.187 orang (32,39 persen) berusia di bawah 15 tahun dan 4.394 orang (3,95 persen) berusia 65 tahun ke atas.

Dari angka tersebut didapat angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Demak sebesar 570,80. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 570 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2004 kepadatan penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.142 orang/Km². penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan kepadatan 1.747 orang /Km², sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 781 orang/Km².

Selama tahun 2004 terdapat 3.410 orang (1.582 laki-laki dan 1.828 perempuan) yang datang dan menjadi penduduk Kabupaten Demak. Jumlah ini turun 67,76 persen dari tahun sebelumnya yang sekitar 10.576 orang. Sedang penduduk yang pergi mencapai 2.547 orang (1.325 laki-laki dan 1.222 perempuan) turun sekitar 37,28 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.061 orang.

2.4. Fertilitas dan Mortalitas

Selama tahun 2004, di Kabupaten Demak terdapat 6.006 kelahiran. Kelahiran tertinggi terjadi di Kecamatan Karanganyar yaitu sebesar 1.282 kelahiran atau sekitar 21,34 persen dari total kelahiran yang terjadi di Kabupaten Demak, sedang tingkat kelahiran terkecil terdapat di Kecamatan Dempet sebesar 52 kelahiran atau 0,87 persen.

Dilihat dari tingkat kelahiran kasar (*Crude Birth Ratio – CBR*) yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan per 1.000 orang penduduk, tercatat CBR

Kabupaten demak tahun 2004 adalah 5,88. Sedang menurut tingkat kematian kasar (*Crude Death Ratio – CDR*) yang merupakan jumlah kematian per 1.000 orang penduduk, maka *CDR* Kabupaten Demak pada tahun yang sama adalah 1,79. Angka-angka ini jauh lebih kecil dibanding angka tahun sebelumnya (2003) dimana tingkat kelahiran kasar sebesar 5,72 dan tingkat kematian kasar 1,89.

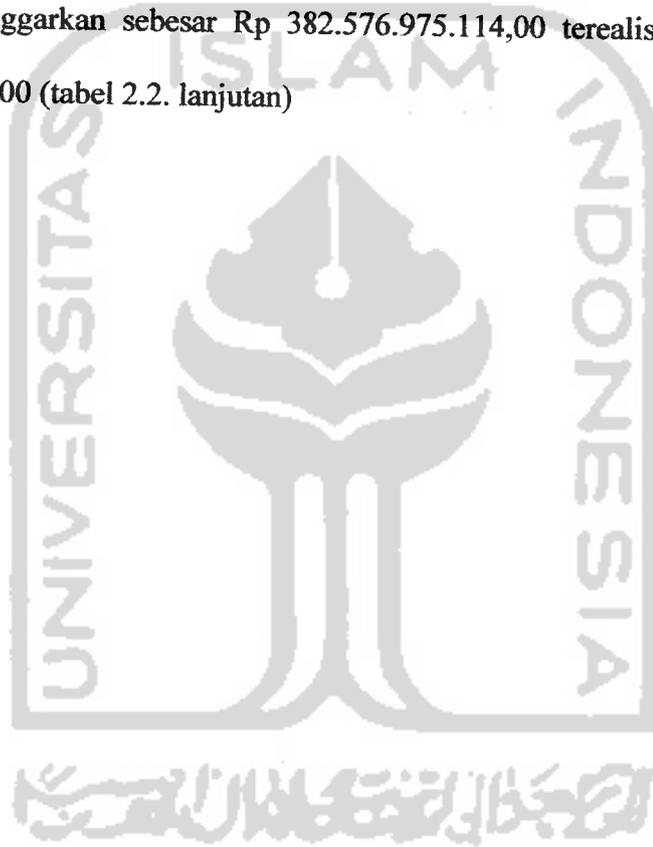
Rasio anak terhadap wanita usia 15-49 tahun (*Child Women Ratio – CWR*) Kabupaten Demak adalah 364,26 yang berarti bahwa terdapat 364 anak berusia 0-4 tahun pada setiap 1.000 wanita usia 15-49 tahun. Angka ini sedikit dibawah angka tahun 2003 yang mencapai *CWR* sebesar 364,59.

2.5. Bidang Keuangan Daerah

Realisasi penerimaan daerah Kabupaten Demak selama tahun 2004 tercatat 357,01 milyar rupiah, sedikit lebih kecil dari tahun 2003 yang sebesar 327,5 milyar rupiah, atau turun sekitar 2,90 persen (Tabel 2.2.). Menurut jenisnya penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,46 milyar rupiah, Dana Perimbangan 302,31 milyar rupiah, dari pemerintahan propinsi 14,72 milyar rupiah, dan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 17,18 milyar rupiah. Dari jumlah penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum yang mencapai 76,83 persen dari total penerimaan daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2004 tercatat Rp 326.445.514.507,00 yang menunjukkan penurunan bila dibanding pada Tahun Anggaran 2003 yang sebesar Rp 327.643.100.953,00. Jika dilihat pada tabel 2.2 maka pada pos biaya Aparatur Daerah terealisasi sebesar Rp 71.098.374.398,00 dan pada Biaya Pelayanan Publik yang sebelumnya di anggarkan sebesar Rp 257.477.701.152,00

teralisasi sebesar Rp 213.488.484.778,00, sedangkan pada Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp 29.479.148.331,00 serta tertulis Belanja Tak tersangka yang dianggarkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.379.507.000,00. Pengeluaran Kabupaten Demak pada tahun 2004 menurun jika dibandingkan pada tahun 2003, total pengeluaran pada tahun 2004 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 382.576.975.114,00 terealisasi sebesar Rp 326.445.514.507,00 (tabel 2.2. lanjutan)



Tabel 2.1.

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, DAN SEX RATIO
PER KECAMATAN
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Mranggen	63 067	63 668	126 735	99,06
02 Karangawan	38 022	39 869	77 891	95,37
03 Guntur	34 882	35 932	70 814	97,08
04 Sayung	44 775	46 151	90 926	97,02
05 Karangtengah	28 347	28 490	56 837	99,50
06 Bonang	48 323	48 057	96 380	100,55
07 Demak	47 213	49 197	96 410	95,97
08 Wonosalam	33 870	34 974	68 844	96,84
09 Dempet	25 303	25 360	50 663	99,78
10 Gajah	23 133	23 260	46 393	99,45
11 Karanganyar	34 730	35 206	69 936	98,65
12 Mijen	28 183	28 212	56 395	99,90
13 Wedung	38 648	40 163	78 811	96,23
14 Kebonagung	19 085	19 194	38 279	99,43
Jumlah Tahun. 2004	507 581	517 733	1 025 314	98,04

Sumber: BPS Kabupaten Demak " Demak Dalam Angka 2004 "

TABEL 2.2
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2004 KABUPATEN DEMAK
(Rp 1.000)

NO	URAIAN	2004		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	PAD	19.115.535.743	17.461.372.028	91,35%
	- Pajak Daerah	5.670.600.000	3.915.544.140	69,05%
	- Retribusi Daerah	9.923.739.300	7.695.002.147	77,54%
	- Laba Perusahaan Milik Daerah	1.104.084.443	1.068.986.443	96,82%
	- Lain-lain PAD yang sah	2.417.112.000	4.781.839.298	197,92%
2	DANA PERIMBANGAN	293.384.826.504	302.370.318.715	100,92%
	- Bagi hasil pajak dan bukan pajak	14.065.229.654	20.490.252.504	145,68%
	- Dana Alokasi Umum	258.928.000.000	258.928.000.000	100,00%
	- Dana Alokasi Khusus	8.230.000.000	8.230.000.000	100,00%
	- Dana Perimbangan dr Propinsi	12.161.526.850	14.722.066.211	121,05%
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	15.397.399.763	17.177.808.746	111,56%
4	Sisa Perhitungan thn lalu	20.339.418.220	20.346.306.154	100,03%
	JUMLAH	348.237.180.230	357.355.807.643	100,81%

Sumber: *kantor Dinas BPKKD kabupaten Demak Tahun 2004*

TABEL 2.2. Lanjutan
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2004 KABUPATEN DEMAK
(Rp 1.000)

NO	URAIAN	2004		%
		ANGGARAN	REALISASI	
II	BELANJA	382.576.975.114	326.445.514.507	85,33%
2.1	APARATUR DAERAH	74.569.043.559	71.098.374.398	95,35%
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	54.156.927.884	52.113.105.398	96,23%
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	42.471.940.284	40.992.154.235	96,52%
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.702.125.400	5.629.760.247	98,73%
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.276.225.000	1.175.506.692	92,11%
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	2.166.727.200	2.080.954.496	96,04%
2.1.1.5	Belanja Lain-lain	2.539.910.000	2.234.729.728	87,98%
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	14.852.255.675	13.540.624.250	91,17%
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	2.353.161.400	2.003.617.490	85,15%
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.708.414.275	8.190.309.665	94,05%
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.073.740.000	1.661.294.150	80,11%
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	1.716.940.000	1.685.402.945	98,16%
2.1.3	Belanja Modal	5.559.860.000	5.444.644.750	97,93%
2.2	PELAYANAN PUBLIK	257.477.701.152	213.488.484.778	82,92%
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	148.218.380.116	147.256.997.765	99,35%
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	136.944.755.716	136.234.092.382	99,48%
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.711.962.400	9.466.495.120	97,47%
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	107.540.000	107.536.500	100,00%
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	905.522.000	900.472.200	99,44%
2.2.1.5	Belanja Lain-lain	548.600.000	548.401.563	99,96%
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	73.316.269.536	49.408.588.333	67,39%
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	7.352.950.923	7.227.075.667	98,29%
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.963.954.145	20.991.535.407	98,72%
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.290.068	1.419.804.500	98,58%
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	43.259.074.400	19.770.172.759	45,70%
2.2.3	Belanja Modal/Pembangunan	35.943.051.500	16.822.898.680	46,80%
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	35.530.230.403	29.479.148.331	82,97%
2.4	Belanja Tak Tersangka	15.000.000.000	12.379.507.000	82,53%
	Total Belanja	382.576.975.114	326.445.514.507	85,33%

TABEL 2.2. Lanjutan
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2004 KABUPATEN DEMAK
(Rp 1.000)

NO	URAIAN	2004		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
III	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Daerah	63.154.213.220	22.132.388.506	35,04%
3.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	20.339.418.220	20.346.308.154	100,03%
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan			
3.1.3	Transfer dari Dana Depresiasi			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	1.611.450.000	1.786.080.352	110,84%
3.1.5	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan			
3.1.6	Pos Penerimaan Pinjaman	41.203.345.000	-	
	Jumlah Penerimaan Daerah	63.154.213.220	22.132.388.506	35,04%
3.2	Pengeluaran Daerah	8.475.000.116	25.144.339.686	296,69%
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	7.625.000.000	7.625.000.000	100,00%
3.2.2	Penyertaan Modal			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
3.2.4	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	116	16.669.339.686	14370120418,97%
3.2.5	Pemberian Pinjaman	850.000.000	850.000.000	100,00%
3.2.6	Pos Pengeluaran PFK			
	Total Pengeluaran Pembiayaan	8.475.000.116	25.144.339.686	296,69%

2.6 Bidang Pendapatan Regional

2.6.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan Propinsi Jawa Tengah pada khususnya, selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Tahun 2002 kinerja ekonomi nasional yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 3,69 persen dan Propinsi Jawa Tengah 3,48 persen, sedang pada tahun 2003 nasional meningkat menjadi 4,10 persen dan Jawa Tengah 4,07 persen

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, dari hasil perhitungan sementara, kinerja ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2004 mengalami peningkatan bila 2,87 persen menjadi 3,40 persen, tahun terakhir mengalami peningkatan (tumbuh positif).

2.6.2. Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita

Pendapatan regional Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Demak sebesar 2.749,43 milyar rupiah maka pada tahun 2004 sebesar 2.989,21 milyar rupiah, atau mengalami kenaikan 1,09 kali selama kurun waktu dua tahun (2003-2004) (Tabel 2.3). Sedang untuk pendapatan regional atas dasar harga konstan mengalami kenaikan 1,03 kali pada periode yang sama, yaitu dari 812,42 milyar rupiah pada tahun 2003 menjadi sebesar 840,08 milyar rupiah tahun 2004 (Tabel 2.4).

Sementara itu, selama kurun waktu dua tahun tersebut PDRB perkapita atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan dari 2.703.274 rupiah pada

tahun 2004 atau naik 1,09 kali (Tabel 2.3). Begitu juga dengan PDRB perkapita atas dasar harga konstan yang mengalami sedikit kenaikan dari 798.778 rupiah pada tahun 2003 menjadi 819.335 rupiah pada tahun 2004 (Tabel 2.4).

2.6.3. Struktur Ekonomi

Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Demak tahun 2002-2004 atas dasar harga berlaku, pertanian masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Demak yang rata-rata mencapai lebih dari 48 persen setiap tahun dan PDRB. Sektor lain yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor-sektor jasa, serta sektor industri pengolahan, dengan sumbangan rata-rata sebesar 20 persen, 10 persen, dan 9 persen setiap tahun. Kontribusi terkecil dibeikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan andil kurang dari satu persen.

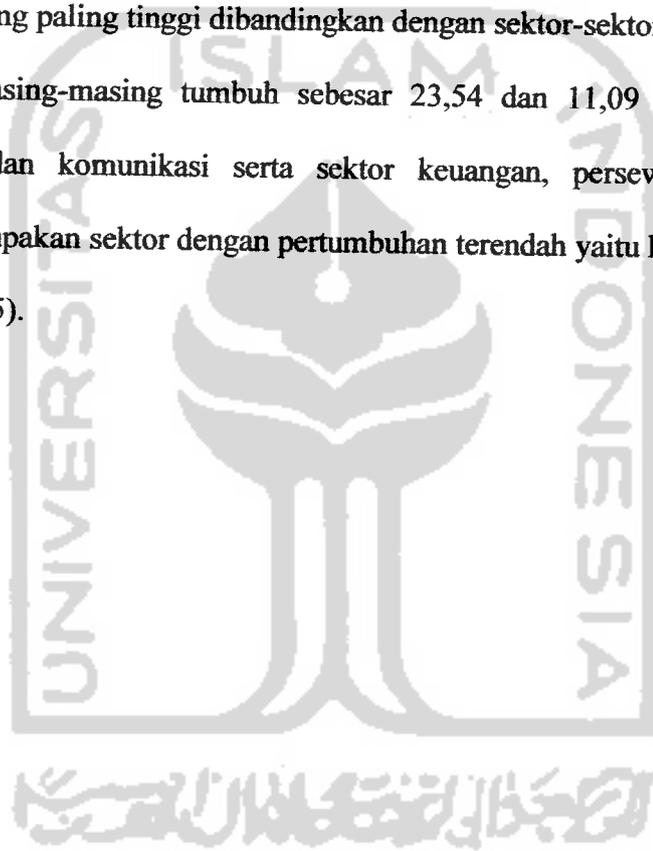
Secara umum belum nampak adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Demak selama tahun 2002-2004. hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Demak yang tetap dan sedikit berfluktuatif.

2.6.4. Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan sementara selama tiga tahun terakhir (2002-2004) telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif dan selalu naik. Jika pada tahun 2002 pertumbuhan PDRB sebesar 2,75 persen, maka pada tahun 2003 tumbuh sebesar 2,81 persen dan tahun 2004 tumbuh sebesar 3,40 persen (Tabel 2.5).

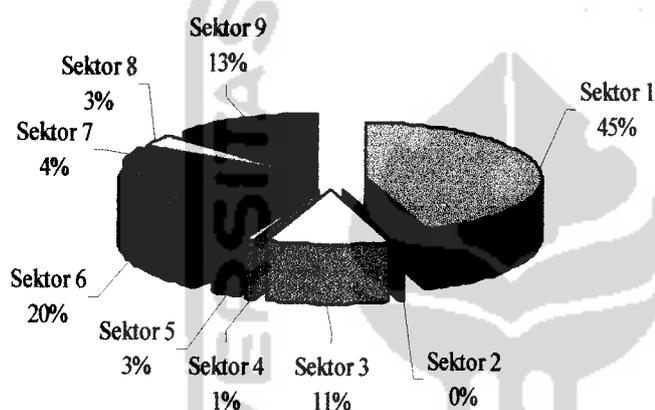
Laju pertumbuhan seluruh sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif yang juga dapat dilihat pada tabel 2.5. Hal ini menunjukkan telah membaiknya perekonomian, dimana seluruh sektor ekonomi berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif terkecuali subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan.

Sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain dengan masing-masing tumbuh sebesar 23,54 dan 11,09 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu kurang dari dua persen (Tabel 2.5).



Gambar 2.1.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Demak
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004

Atas Dasar Harga Konstan 1993

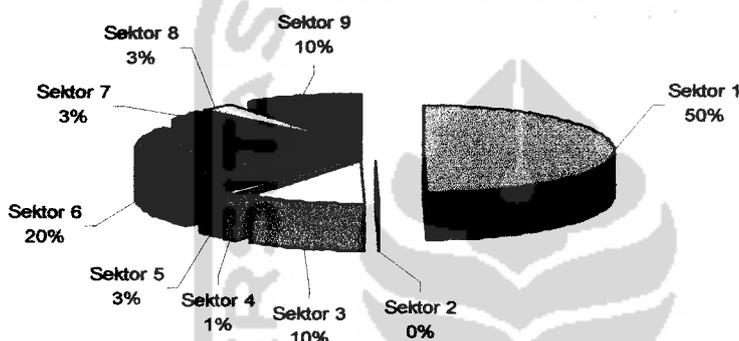


Keterangan Gambar:

- Sektor 1 : Pertanian sebesar 49,60%
- Sektor 2 : Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,23%
- Sektor 3 : Industri sebesar 11%
- Sektor 4 : Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1,04%
- Sektor 5 : Bangunan sebesar 3%
- Sektor 6 : Perdagangan Besar dan Kecil sebesar 20,21%
- Sektor 7 : Pengangkutan Dan Komunikasi sebesar 4%
- Sektor 8 : Keuangan, Persewaan, Jasa Pengangkutan sebesar 3,06%
- Sektor 9 : Jasa – Jasa sebesar 10,06%

Gambar 2.2.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Demak
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004

Atas Dasar Harga Berlaku



Keterangan Gambar:

- Sektor 1 : Pertanian sebesar 50%
- Sektor 2 : Pertambangan dan Penggalian sebesar 0%
- Sektor 3 : Industri sebesar 10%
- Sektor 4 : Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 1%
- Sektor 5 : Bangunan sebesar 3%
- Sektor 6 : Perdagangan Besar dan Kecil sebesar 20%
- Sektor 7 : Pengangkutan Dan Komunikasi sebesar 3%
- Sektor 8 : Keuangan, Persewaan, Jasa Pengangkutan sebesar 3%
- Sektor 9 : Jasa – Jasa sebesar 10%

Tabel 2.3.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BELAKU**TAHUN 2002 – 2004****(Rp 1.000)**

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	1 145 817.20	1 352 719.76	1 482 628.45
1.1. Tanaman Bahan Makanan	869 902.31	1 033 155.07	1 165 160.70
1.2. Tanaman Perkebunan	48 120.65	52 756.37	40 511.85
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	61 698.00	76 591.35	86 240.34
1.4. Kehutanan	75 887.55	83 151.54	62 618.44
1.5. Perikanan Laut dan Darat	90 208.69	107 065.43	128 097.12
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5 755.42	6 334.34	6 806.25
3. INDUSTRI	259 908.10	273 370.14	294 857.03
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	19 570.98	23 243.27	31 184.18
5. BANGUNAN	65 118.17	73 208.70	78 347.95
6. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	527 365.26	587 972.13	604 017.34
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	74 657.04	94 683.19	99 177.56
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN	78 732.18	86 287.12	91 382.29
9. JASA-JASA	230 402.72	251 614.07	300 802.71
Produk Domestik Regional Bruto	2 407 327.07	2 749 432.72	2 989 210.76
Jumlah Penduduk (Orang)	996 384	1 017 075	1 025 314
PDRB Per Kapita (Rupiah)	2 416 064	2 703 274	2 915 410

Sumber : BPS Kabupaten Demak " Demak Dalam Angka 2004 "

Tabel 2.4.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN
1993
TAHUN 2002 – 2004
(Rp 1.000)

Lapangan Usaha (1)	2002 (2)	2003 (3)	2004 (4)
1. PERTANIAN	347 673.86	364 677.11	372 974.54
1.1. Tanaman Bahan Makanan	254 540.80	268 323.30	280 989.34
1.2. Tanaman Perkebunan	13 841.70	14 028.55	9 978.52
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	23 215.70	24 935.80	25 969.09
1.4. Kehutanan	25 262.25	25 513.73	18 579.47
1.5. Perikanan Laut dan Darat	30 813.42	25 513.73	18 579.47
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	2 019.80	2 065.09	2 111.97
3. INDUSTRI	91 211.82	91 355.39	94 461.47
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	5 355.02	5 085.88	6 283.13
5. BANGUNAN	22 852.49	23 354.55	24 108.90
6. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	160 043.86	161 652.23	163 532.87
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI			
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN	34 118.02	34 903.73	35 417.49
9. JASA-JASA	27 209.13	27 529.44	28 103.21
	99 719.04	101 793.29	113 081.62
Produk Domestik Regional Bruto	790 203.04	812 416.71	840 075.22
Jumlah Penduduk (Orang)	996 384	1 028 312	1 025 314
PDRB Per Kapita (Rupiah)	793 071	790 049	819 335

Sumber : BPS Kabupaten Demak " Demak Dalam Angka 2004 "

Tabel 2.5.
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADH KONSTAN 1993
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2002 – 2004
(%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	2.7	4.89	2.28
1.1. Tanaman Bahan Makanan	2.68	5.41	4.72
1.2. Tanaman Perkebunan	0.75	1.35	-28.87
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.05	7.41	4.14
1.4. Kehutanan	0.73	1.00	-27.18
1.5. Perikanan Laut dan Darat	6.49	3.45	17.51
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4.12	2.24	2.27
3. INDUSTRI	3.21	0.16	3.40
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	18.02	-5.03	23.54
5. BANGUNAN	4.07	2.20	3.23
6. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.62	1.00	1.16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5.05	2.30	1.47
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN	1.12	1.18	2.08
9. JASA-JASA	2.85	2.08	11.09
Produk Domestik Regional Bruto	2.75	2.81	3.40

Sumber : BPS Kabupaten Demak " Demak Dalam Angka 2004 "

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Baik itu dalam bentuk penelitian biasa, tesis dan skripsi. Yang mana mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi ini, seperti oleh beberapa penelitian di bawah ini:

Penelitian mengenai kemampuan keuangan-keuangan pernah dilakukan. Dari beberapa penelitian yang ada dengan menggunakan variable yang sama yang dikemukakan adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian suatu daerah, dan hasil yang diperoleh dan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Yulianti

Menurut Yulianti (Abdul Halim, 2004), yang meneliti tentang “Kemampuan Keuangan Daerah dengan studi kasus Kabupaten Malang.” Keberhasilan otonomi daerah diperlukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan - tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan yang merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai kemandirian.

Berdasarkan hasil penelitian dari sisi keuangan daerah disimpulkan sebagai berikut

- a. Desentralisasi yang dihitung dari proporsi PAD terhadap APBD yang mencapai rata-rata sebesar 15% dan proporsi BHPBP terhadap PDRB sebesar 29%. Hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Untuk dapat mencapai kemandirian dengan mengandalkan pada PAD saja, maka diperlukan waktu lebih kurang 7 tahun, sedangkan jika mengandalkan PAD + BHPBP maka diperlukan waktu, lebih kurang 4 tahun.
- b. Dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata sebesar 32% dan jika ditambah dengan hasil dari bagi hasil pajak/bukan pajak mencapai 65%. Hal ini juga berindikasi bahwa dalam pembiayaan belanja rutin masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.
- c. Kapasitas Fiskal yang relative baik dibandingkan dengan standard rata-rata Kabupaten yang diteliti dibandingkan dengan Kebutuhan Fiskalnya maka terdapat ketergantungan (gap) sebesar 12%. Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut masih diperlukan dana dari pemerintah pusat.

3.2. Kifliansyah

Berdasarkan analisa perkembangan realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah, dengan menggunakan variable yang sama yaitu : Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, secara garis

besar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut (Abdul Halim, 2004):

- a. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar dananya masih bersumber dari alokasi pemerintah/instansi yang lebih tinggi (pemerintah pusat) mengindikasikan bahwa suatu daerah tidak dapat dikatakan mandiri.
- b. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang pengeluaran baik belanja rutin maupun belanja pembangunan (belanja modal) yang relative masih sangat rendah yaitu kurang dari 5% dari total pengeluaran, sehingga ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
- c. Dengan menggunakan Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah, sedangkan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sumbangannya masih kecil terhadap pemerintah daerah berarti kemampuan untuk pembiayaan pembangunan masing mengalami ketergantungan terhadap pemerintah

3.3. Jasagung Heriyadi

Menurut Jasagung Heriyadi (Abdul Halim, 2004), dalam penelitiannya *Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kotamadya Yogyakarta 1996/1997*," seperti di kutip oleh Abdul Halim (2004), dikemukakan bahwa untuk mengukur derajat desentralisasi Fiskal proporsi PAD dan BHPBP terhadap PAD dapat

menentukan sejauh mana tingkat kemampuan suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

3.4. Nataludin

Menurut Nataludin dalam penelitiannya “Potensi Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Propinsi Jambi” yang menganalisis dengan menggunakan alat analisis Kefasitas Fiskalnya memberikan kesimpulan bahwa:

- d. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah yang sangat rendah dengan persentase antara 2,31% sampai dengan 21,60% berarti daerah tersebut tidak mampu menjalani otonomi, tetapi jika tidak ada dana perimbangan.
- e. Penerimaan daerah dengan dibantu dari dana perimbangan, memberikan kontribusi yang sangat besar pada penerimaan daerah, sehingga dana perimbangan ini juga dapat dijadikan tambahan dana yang dapat menilai tingkat kemampuan daerah dalam membiayai keuangannya (Abdul Halim, 2004).

3.5. Sumodiningrat

Menurut Sumodiningrat (2002), dalam penelitiannya tentang pembangunan ekonomi terutama pembangunan di daerah, peranan yang sangat penting dari keuangan daerah adalah adanya pemantapan otonomi daerah. Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan keputusan dan administrasi pembangunan serta delegasi pembiayaan pembangunan. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan didalam

memanfaatkan potensi alam dan ekonomi serta manajemen keuangan daerah (Mardiasmo, 2002).

3.6. Mardiasmo

Menurut Mardiasmo (2002), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen kemampuan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan (*to report*), serta mengungkapkan (*to disclose*) segala kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik (*public money*) kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

3.7. Koswara

Menurut Koswara dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ciri utama menunjukkan suatu daerah tersebut otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat sistem pemerintahan (Mardiasmo, 2002).

3.8. Paid Hersney dan Kenneth Blanchard

Menurut Paul Hersney dan Kennethh Blanchard, secara konseptual pola hubungan antara pusat dengan pemermitah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan (Davey, 1988).

3.9. Husnan dan Suwarsono

Menurut Husnan dan Suwarsono (1994), yang menyatakan bahwa tahap perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan karena pada pada tahap ini diidentifikasi berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu masing-masing kegiatan, biaya termasuk didalamnya *supply* logistik agar masing-masing kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Secara operasional anggaran daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan potensi suatu daerah serta sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kemudian diterapkan dalam menjalankan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat (Supriatmo, 1996).

3.10. Rizal Sujarwan

Menurut Rizal Sujarwan (2005), dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemempuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2002, menyimpulkan bahwa:

- a. Derajat desentralisai fiskal yang dihitung dari proporsi PAD terhadap APBD untuk tahun 2002 sebesar 4,27%, sedangkan proporsi Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak terhadap PDRB sebesar 3,16% serta Sumbangan dan Bantuan daerah untuk Tahun Anggaran 2002 sebesar 89,78%. Secara nominal dari jumlah DF PAD + DF BHBP + DF SB dengan hasil kurang dari 100% yaitu 97,13% hal ini sebanding dengan peningkatan untuk sisi pengeluarannya (100% dari total APBD). Hal ini berarti bahwa pembiayaan belanja pembangunan masih sangat tergantung pada alokasi dana pemerintah yang lebih tinggi, yaitu dari dana APBN dan APBD daerah.

- b. Kabupaten Gunungkidul memiliki kebutuhan fiskal 13 kali lebih besar dari rata – rata kebutuhan fiskal standar Daerah Istimewa Yogyakarta rata – rata kebutuhan fiskal standar D.I Yogyakarta sebesar Rp 26.529,00 yaitu 3332.003,30 (dalam Rp 1.000). Namun hal ini juga berindikasi bahwa dalam pembiayaan rutin masih memerlukan bantuan dari pusat.
- c. Dengan demikian kapasitas fiskal Kabupaten Gunungkidul sebesar 4 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan kapasitas fiskal standar Daerah Istimewa Yogyakarta RP 319,8 (dalam Rp 1.000). hal ini diharapkan dapat ditutup melalui mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat.

Melalui penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa untuk mengukur kemampuan, kemandirian, dan ketergantungan pembiayaan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, penelitian yang sedang dilakukan untuk subyek yang sama lebih mengarah pada kemampuan keuangan daerah ditinjau dari aspek yang sama, dalam hal ini yang diamati adalah sama.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Pembangunan Ekonomi

Perhatian secara *intens* terhadap masalah pembangunan mulai dirasakan oleh banyak negara setelah Perang Dunia kedua, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama berkembangnya cita-cita negara-negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan mereka di bidang ekonomi dari negara-negara maju, misalnya Indonesia, Pakistan, dan Korea. Negara-negara tersebut relatif miskin dan juga mengalami masalah kependudukan yang cukup serius yang ditandai oleh kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan yaitu mengurangi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor di atas, berkembangnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan (khususnya ekonomi) di negara sedang berkembang juga memberi pengaruh pada perkembangan pembangunan di negara sedang berkembang. Perhatian-perhatian negara maju terhadap pembangunan di negara sedang berkembang tersebut disebabkan oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju tersebut untuk membantu negara sedang berkembang dalam mempercepat ~~laju pembangunan ekonomi~~ mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju.

4.2. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi mempunyai pengertian yang luas, pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan - kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapitan
3. Kenaikkan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam angka panjang.

Masalah-masalah dalam pembangunan merupakan suatu jalinan dari masalah sosial, ekonomi, politik, administrasi dan sebagainya yang saling berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian kebijaksanaan yang harus dilakukan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat non ekonomi, untuk melengkapi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-seluasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan budaya dalam pengertian pembangunan yang lebih luas. Peningkatan produksi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, selain dari segi peningkatan produksi secara kuantitatif. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola pembangunan Alokasi sumber daya produksi (*Productive resources*) diantara

sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembangunan Distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (*Institutional Frame Work*) dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya pembangunan ekonomi dalam arti luas meliputi pertumbuhan (sebagai salah satu arti pokok dalam proses pembangunan). Hal ini diperlukan karena berhubungan dengan kenyataan bertambahnya penduduk, sehubungan dengan itu juga laju pertumbuhan (cepat atau lambat meningkatnya produksi barang dan jasa) harus cukup tinggi dalam arti melampaui tingkat penambahan penduduk, maka dalam keadaan seperti itu akan terjadi kemacetan atau stagnasi ekonomi. Apalagi kalau pertumbuhan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan bertambahnya penduduk, dalam keadaan seperti ini yang terjadi justru kemunduran ekonomi yang mempertajam ketegangan sosial.

4.3 Otonomi Daerah

Berdasar Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional. Salah satu sasaran yang akhir-akhir ini mendapatkan

perhatian dan prioritas adalah perkembangan dan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah guna dapat melaksanakan otonomi daerah secara luas dan nyata serta bertanggung jawab. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU No.32/2004) tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang rancangan kebijakan terhadap pemerintah daerah yang dinyatakan dalam Bab XI 11 pasal 224 ayat (1) dan ayat (2), yaitu (Tabrani, 2004) :

- a) Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- b) Ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan :
 - a. Pembentukan, penyempurnaan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
 - b. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi :
 1. Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing daerah berdasarkan besaran DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasar besarab DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan yang mendasar atas disahkannya kedua UU tersebut adalah pada terdapatnya kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah. Karena pengelolaan keuangan daerah menjadi isi dan isu utama otonomi daerah, maka fungsi keuangan menjadi sangat penting bagi daerah sebab keuangan merupakan motor bagi penggerak roda perekonomian daerah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan daerah, maka organisasi pengelola keuangan juga akan mengalami perubahan.

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985), dalam sebuah analisis yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan, yaitu (Mardiasmo, 2002) :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Abdul Halim, 2004).

Pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor - faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian tersebut adalah merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah,

terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai penggerak jalannya pemerintahan daerah (Abdul Halim, 2004).

4.4. Dana Perimbangan

Penyerah tugas pemerintah harus diikuti dengan penyerahan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan, penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dituangkan dalam APBD, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari Dana perimbangan. **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan ini adalah

1. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
2. Dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana alokasi khusus (DAK), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan tertentu.

4.5. Desentralisasi dan Keuangan Daerah

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi adanya penyerahan sumber dan, sumber daya manusia, dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan yang diserahkan ke daerah. Masalah bukan jumlah dana yang memadai, tetapi seberapa jauh kewenangan

daerah menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah (Davey, 1988).

Pelaksanaan urusan daerah tersebut membutuhkan suatu kebijakan keuangan daerah yang efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara pada tingkat pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan alat fiskal pemerintah, hal ini bagian dari integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik (Davey, 1988).

Kebijakan keuangan daerah sendiri mencakup (Davey, 1988):

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah. Semakin penting titik berat otonomi di daerah Tingkat II dari aspek politik, pemerintahan dan ekonominya, dorongan Daerah Tingkat II lebih berperan, tampaknya membutuhkan reformasi keuangan daerah.

Menurut Denis A. Rondineli, John R. Nelis dan G. Sabbler Cheema (Davey, &J, 1998) bahwa desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan budaya seperti:

1. Sampai seberapa jauh birokrasi politik lokal mendukung desentralisasi melalui pelimpahan organisasi dan tanggungjawabnya.

2. Seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang mendukung terciptanya iklim desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
3. Kebijakan dan program yang dirancang yang memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
4. Sampai seberapa jauh tersedianya sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapatkan pelimpahan tanggung jawab.

Faktor yang terakhir merupakan isu kebijakan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan struktur peningkatan pengelolaan keuangan yang diarahkan pada penggalan potensi, investasi, dan bantuan. Peran keuangan daerah semakin penting selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa bantuan dan subsidi, juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi masyarakat daerah (Davey, 1988).

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (Davey, 1988).

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah, baik mengenai Pengeluaran Belanja Pegawai dan Operasional Daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBN. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai Penerimaan Asli Daerah (pajak-dan retribusi daerah) yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat (Davey, 1988).

Asas tugas pembantuan, pemerintah pusat dapat menugaskan daerah untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan pemerintah pusat. Demikian pula pemerintah daerah dapat menugaskan pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk melakukan tugas tersebut. Desentralisasi menekankan agar urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dibiayai atas beban APBN. Disisi pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal, baik dalam struktur penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah yang tercermin dalam APBD (Davey, 1988).

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan pencerminan kebijaksanaan dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran daerah dalam bentuk uang. Pengelolaan APBD dilaksanakan berdasarkan aturan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka asas desentralisasi, struktur keuangan daerah yang tercermin dalam APBD merupakan motor penggerak dalam kegiatan otonomi daerah, maupun penunjang bagi komplementer dan suplementer terhadap pelaksanaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah (Davey, 1988).

Desentralisasi keuangan ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan gerak pembangunan daerah guna menunjang tujuan pembangunan daerah, selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi secara nyata dan bertanggung jawab. Secara spesifik keuangan daerah itu penting, karena (Davey, 1988):

1. Keuangan daerah sangat berperan jumlahnya dalam perekonomian nasional (dilihat dari PDB) dan perekonomian regional (dilihat dari PDRB).
2. Banyak barang publik (fasilitas sosial ekonomi) yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Kebijakan pemerintah daerah biasanya mempengaruhi (melandasi) kebijakan-kebijakan nasional.
4. Masalah *diversity and ease of mobility*.

Diversity adalah karakter ekonomi antar daerah yang berbeda-beda (beragam). *Ease of mobility*, bahwa dalam perekonomian daerah mudah sekali berpindah-pindah (bergerak) aktivitas ekonominya sehingga mempengaruhi perekonomian daerah.

Keuangan daerah pada dasarnya permintaan terhadap barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah analog atau mirip dengan permintaan terhadap barang dan jasa nasional. Konsep dasar yang melandasi permintaan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berarti sama dengan landasannya dengan konsep permintaan konsumen dalam hal teori kepuasan maksimal (*marginal utility theory*) (Baswir, Revrison, 1999).

Konsumen dalam hal mengkonsumsi barang dan jasa selalu ingin bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya dengan didasari oleh anggaran (pendapatan) yang ada, maka dapat dikatakan dalam konteks keuangan daerah permintaan terhadap barang dan jasa oleh pemerintah daerah hanyalah merupakan perluasan pandangan dari teori permintaan konsumen untuk membentuk teori perilaku pemerintah daerah (Baswir, Revrison, 1999).

4.6. Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002) antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*
2. Kualitas layanan yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi)
5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil

Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD dan kemandirian. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber pada sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan.

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal ini akan menyebabkan terjadi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya, dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.

4.7. Pinjaman Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya dinyatakan dalam Bab XIII pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) (Tabrani, 2004).

Adanya pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan dan

kedewasaan sistem perencanaan anggaran daerah secara lebih mantap dan mandiri (strategi investasi). Pemerintah daerah menentukan skala prioritas program yang layak dibiayai oleh dana pinjaman yaitu program pengembangan infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur khusus.

Berdasarkan tujuan penggunaannya pinjaman daerah diklasifikasikan menjadi (Departemen Dalam Negeri, 1994: 8):

1. Pinjaman daerah untuk membiayai program infrastruktur sosial yang bertujuan meningkatkan pelayanan umum
2. Pinjaman daerah untuk membiayai program infrastruktur ekonomi atas dasar pemulihan biaya
3. Pinjaman untuk penyertaan modal dalam perusahaan daerah; dan
4. Pinjaman daerah secara langsung digunakan untuk mengembangkan bidang usaha untuk dapat menghasilkan keuntungan

Pemerintah daerah senantiasa ingin mendapatkan pinjaman daerah dengan syarat-syarat yang lunak dan tidak memberatkan di saat jatuh tempo membayar angsuran pinjaman (Davey, 1988: 227).

Namun demikian pinjaman daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Menurut Jones (1996: 20), beberapa efek utama yang muncul dan adanya pinjaman pemerintah adalah (Davey, 1988):

1. Pemerintah punya kelebihan dana untuk pengeluaran berjalan atau investasi modal
2. Kekurangan dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk investasi dapat dilakukan oleh sektor swasta (*private sector*)

3. Bertambahnya pinjaman membutuhkan akan pajak yang lebih tinggi
4. Keadaan neraca pembayaran akan tertekan (*distorted*) jika pinjaman bersumber dari luar negeri

Memungkinkan timbulnya inflasi akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah.

4.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang. Sejak tahun 1967, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus untuk tahun 2000 tahun anggaran akan dimulai tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember (Mardiasmo, 2002).

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Bab XIII Pasal 224 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tabrani, 2004).

Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja di pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga perlu memahami darimana sumber keuangan itu diperoleh. Dalam hal

ini Undang-undang No. 32 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari (Tabrani, 2004):

Ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Ayat (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:

- a. Pembentukan, penyempurnaan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus
- b. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi:
 1. Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 2. Formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing daerah berdasarkan besaran DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasar besaran DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.9. Tujuan Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Asas Negara Kesatuan Indonesia menyatakan bahwa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Atas asas ini maka antara keuangan negara/pusat dan keuangan daerah terdapat hubungan yang sangat erat

sekali, bukan saja antara tingkatan pemerintahan, akan tetapi mencakup pula faktor-faktor strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah (Davey, 1988).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah kompleks, karena mencakup permasalahan yang sangat luas. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merumuskan suatu sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat maupun daerah, baik faktor ekonomi dan ekonomis khususnya politis (Davey, 1988).

Kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan tidak dapat ditafsirkan bahwa tiap tingkatan pemerintah di daerah harus dapat membiayai seluruh keperluan dari penerimaan asli daerah. Adanya pemerataan dalam kebijakan trilogi pembangunan memungkinkan diberikannya bantuan atau sumbangan pemerintah pusat kepada daerah, disamping adanya proyek tersebut dilaksanakan (Sadono Sukirno, 1999).

Tujuan hubungan antara keuangan pusat dan daerah (Davey, 1988: 225) adalah:

1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintah mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya.
2. Pemerintah daerah mendapat yang cukup dari sumber-sumber dana, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik (penyediaan dana untuk menutupi kebutuhan rutin pembangunan).

3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
4. Pemerintah daerah dalam mengusahakan pendapatan sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.



BAB V

Metode Penelitian

5.1. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah dan Kantor Badan Penyelenggara Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Demak. Data yang digunakan adalah data Rencana Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang telah terealisasi. Penelitian ini juga didukung dengan adanya data tambahan antara lain:

1. Data APBD Kabupaten dan propinsi diseluruh Propinsi Jawa Tengah.
2. Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah.
3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.
4. Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2003.
5. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak.
6. PDRB Jawa Tengah Tahun 2003.
7. PDRB Kabupaten Demak Tahun 2003.

5.2. Metode analisis

5.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah alat untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus berupa uraian secara sistematis. Analisis ini untuk memperoleh informasi – informasi mengenai kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Demak tahun anggaran 2003.

fis

5.2.2 Analisis Kuantitatif

alc

6.

Analisis Kuantitatif adalah analisis yang menggunakan data berupa angka – angka perhitungan. Analisis ini dapat diperoleh dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal (*fiscal need*), dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*)

5.3. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini menggunakan variabel – variabel sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan satuan milyar rupiah. (UU RI No.33 Tahun 2004).

2. Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dengan satuan milyar rupiah. (UU RI No.33 Tahun 2004).

3. Penerimaan Daerah

Uang yang masuk ke kas daerah dengan satuan milyar rupiah.

(UU RI No.33 Tahun 2004).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan satuan milyar rupiah. (UU RI No.33 Tahun 2004).

5. PDRB

Menurut Pendekatan Produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dengan cara mengurangi biaya antara dari masing – masing total produksi bruto tiap – tiap kegiatan, sub sektor atau sector dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dengan satuan juta rupiah.

(PDRB Kabupaten Demak, BPS 2003).

6. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk adalah jumlah semua orang yang biasanya tinggal atau rumahtangga 6 bulan dan lebih atau yang belum 6 bulan namun berniat untuk menetap diukur dengan satuan jumlah jiwa. (Statistik Sosial Kependudukan Kabupaten Demak Hasil Sensusnas 2003)

5.4. Alat Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*), dan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*), yaitu untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dengan rumus sebagai berikut:

5.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang telah diberlakukan, perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Salah satu kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk perlu diketahui dengan cara perhitungan melalui Derajat desentralisasi Fiskal yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemandirian dengan melihat estimasi penerimaan PAD, BHPBP, dan sumbangan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan menggunakan rumus (Abdul Halim, 2004):

$$DF \text{ PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ BHPBP} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ SB} = \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Penjumlahan dari TPD = DF PAD + DF BHPBP + DF SB, hasil perhitungan tinggi maka desentralisasinya tinggi/mandiri (TPD = 100%).

5.4.2. Kebutuhan Fiskal (*fiscal need*)

Alat bantu untuk mengetahui kebutuhan fiskal kabupaten Demak, maka terlebih dahulu dihitung kebutuhan fiskal standar yang diperoleh dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah (Abdul Halim, 2004).

$$SKF = \frac{\sum \text{Pengeluaran Daerah} / \sum \text{Penduduk Kabupaten Demak}}{\sum \text{Kabupaten/Kota}}$$

Menghitung Indeks Pelayanan Publik PerKapita Kabupaten Demak digunakan tahun anggaran 2003 adalah sebagai berikut:

$$PPP = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Per Kapita}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Besarnya Indeks Pelayanan Publik PerKapita Kabupaten Demak:

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa - jasa publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal}}$$

Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

5.4.3. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*)

Sama halnya dengan kebutuhan fiskal di atas, untuk standar fiskal adalah kapasitas fiskal Propinsi Jawa Tengah digunakan data PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2003, maka besarnya kapasitas fiskal standar sebagai berikut (Abdul Halim, 2004):

$$KFs \text{ Propinsi Jawa Tengah} = \frac{\sum \text{PDRB} / \sum \text{Penduduk Propinsi Jawa Tengah}}{\sum \text{Kabupaten/Kota}}$$

Besarnya kapasitas fiskal kabupaten Demak dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{KF Kabupaten Demak} = \frac{\sum \text{PDRB} / \sum \text{Penduduk Kabupaten Demak}}{\sum \text{Kapasitas Fiskal Standarn (KFS)}}$$

Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.

5.4.4. Upaya/ posisi Fiskal

Upaya fiskal (*tax effect*) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{UPPAD}_j = \frac{\text{PAD}_j}{\text{kapasitas / potensi PAD}}$$

Atau

$$\text{UPPAD}_j = \frac{\text{PAD}_j}{\text{PDRB}_j (\text{tanpa migas})}$$

Selanjutnya dihitung tingkat PAD standar (TPADs)

$$\text{TPADs} = \frac{\sum \text{PAD} / \text{PDRB}}{\sum \text{Kabupaten dan kota}}$$

Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus:

$$\text{IKPAD} = \frac{\text{UPPAD}}{\text{TPADs}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasilnya, maka semakin besar upaya pajak daerah sekaligus menunjukkan posisi fiskal daerah.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Metode untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan daerah Tahun Anggaran 2003, dalam pembahasan ini digunakan alat analisis yang dikelompokkan sebagai berikut:

6.1. Derajat Desentralisasi Fiskal.

Derajat Desentralisasi Fiskal sebagaimana diuraikan pada BAB IV, yaitu; untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal dalam mengetahui kemampuan keuangan daerah menurut Hikmah (1999) dalam bukunya Abdul Halim menggunakan Formula antara lain:

$$DF \text{ PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ BHPBP} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ SB} = \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2004) (Tabel 1.3, hal. 12):

$$DF \text{ PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ PAD} = \frac{17.671.121.260,00}{327.518.002.152,00} \times 100\%$$

$$DF \text{ PAD} = 0,0539 \times 100\%$$

$$DF \text{ PAD} = 5,39\%$$

Memperhatikan perkembangan dari hasil perhitungan rasio ini terlihat bahwa porposi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah tahun anggaran 2003 sebesar 5,39%.

$$DF \text{ BHPBP} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ BHPBP} = \frac{19.165.601.959,00}{327.518.002.152,00} \times 100\%$$

$$DF \text{ BHPBP} = 0,0585 \times 100\%$$

$$DF \text{ BHPBP} = 5,85\%$$

Porposi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah dilihat dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal sebesar 5,85%.

$$DF \text{ SB} = \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$DF \text{ SB} = \frac{245.940.000.000,00}{327.518.002.152,00} \times 100\%$$

$$DF \text{ SB} = 0,7509 \times 100\%$$

$$DF \text{ SB} = 75,09\%$$

Proporsi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah sebesar 75,09%. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Demak masih membutuhkan subsidi yang diperlukan untuk berbagai pembiayaan belanja daerah. Dengan demikian Kabupaten Demak masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat.

Total dari hasil yang telah diolah untuk mengetahui tingkat kemandirian (TPD= 100%) dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{TPD} = \text{DF PAD} + \text{DF BHPBP} + \text{DF SB}$$

$$\text{TPD} = 5,39\% + 5,85\% + 75,09\%$$

$$\text{TPD} = 86,33\%$$

Perkembangan PAD terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total APBD tahun 2003 sebesar 5,39%, penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara nominal yang hanya sebesar 5,85%, dan proporsi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah mencapai 75,09%, secara nominal dengan melihat total DF PAD + DF BHPBP + DF SB yaitu sebesar 86,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Demak masih memerlukan campur tangan pemerintah pusat dalam menutup kekurangan pembiayaan daerah.

6.2. Kebutuhan Fiskal

Perhitungan untuk mengetahui Kebutuhan Fiskal Kabupaten Demak maka terlebih dahulu menghitung Kebutuhan Fiskal Standart yang diperoleh dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah tahun 2003 berdasarkan harga Konstan (Rp 1.000), sebagai berikut (lampiran hal. 85):

- Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan = Rp 2.433.606.983.000,00
- Jumlah Penduduk Jateng = 32.052.840 jiwa
- Pengeluaran Rutin dan Pembangunan per kapita = Rp 75.924,84

Berdasarkan data di atas maka besarnya rata – rata kebutuhan fiskal standar se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 (Rp 1.000), sebagai berikut

$$SKF = \frac{\sum \text{Pengeluaran Daerah} / \sum \text{Penduduk propinsi Jawa Tengah}}{\sum \text{Kabupaten/Kota}}$$

$$SKF = \frac{2.433.606.983.000 / 32.052.840}{35}$$

$$SKF = \frac{75.924,84}{35}$$

$$SKF = \text{Rp } 2.169,28$$

Menghitung Indeks Pelayanan Publik PerKapita Kabupaten Demak digunakan Tahun Anggaran 2003, sebagai berikut (tabel 1.3. hal. 13):

- Jumlah Pengeluaran / Belanja Daerah = Rp 327.643.100.953,00
- Jumlah Penduduk = 1.024.934 jiwa
- Jumlah Pengeluaran PerKapita = Rp 319.672,38

Besarnya Indeks Pelayanan Publik PerKapita Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

$$PPP = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$PPP = \frac{327.643.100.953}{1.024.934}$$

$$PPP = \text{Rp } 319.672,38$$

Besarnya Indeks Pelayanan Perkapita Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003:

$$IPPP = \frac{\sum \text{Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa - jasa publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiska (SKP)}}$$

$$IPPP = \frac{319.672,38}{2.169,28}$$

$$IPPP = 147,36 \approx 147 \text{ kali}$$

Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kabupaten Demak sebesar 147 kali lebih besar dari rata – rata. Kebutuhan fiskal Standar Jawa Tengah yang sebesar Rp 319.672,38. Besarnya Kebutuhan fiskal daerah ini ditentukan karena besarnya biaya yang digunakan, dengan melihat luas wilayah Kabupaten Demak yang mencerminkan cakupan atau area yang menjadi tanggungjawab pelayanan publik pemerintah daerah jika semakin besar cakupan wilayah pelayanan maka semakin besar pula kebutuhan fiskal yang diperlukan. Besarnya Kebutuhan Fiskal ditentukan oleh jumlah penduduk tahun 2003 semakin besar jumlah penduduk mencerminkan semakin besar pula tingkat kebutuhan pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Keadaan geografi daerah yang berimplikasi pada tingkat kelemahan suatu wilayah. Tingkat kemiskinan dengan pengertian tingginya jumlah penduduk miskin menuntut peran fiskal pemerintah yang lebih besar untuk mengangkat kesejahteraan mereka, tingkat kematian bayi yang mencerminkan kondisi tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Jika kondisi tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penduduk rendah maka peran fiskal pemerintah juga semakin besar.

6.3. Kapasitas Fiskal

Menghitung Kapasitas Fiskal sama halnya menghitung Kebutuhan Fiskal di atas, untuk standar fiskal adalah Kapasitas Fiskal Jawa Tengah dengan menggunakan data PDRB perkapita Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2003 (Rp 1.000), maka besarnya Kapasitas Fiskal standar adalah sebagai berikut: (tabel 2.4, hal. 35):

fiska
aloka

$$\text{KFs Propinsi Jawa Tengah} = \frac{\sum \text{PDRB} / \sum \text{Penduduk Propinsi Jawa Tengah}}{\sum \text{Kabupaten/Kota}}$$

6.4.

$$\text{KFs Propinsi Jawa Tengah} = \frac{45.605.369.000.000,00 / 32.052.840}{35}$$

$$\text{KFs Propinsi Jawa Tengah} = \frac{1.422.818,35}{35}$$

$$\text{KFs Propinsi Jawa Tengah} = \text{Rp } 40.651,95$$

Kapasitas Fiskal Kabupaten Demak dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{KF Kabupaten Demak} = \frac{\sum \text{PDRB} / \sum \text{Penduduk Kabupaten Demak}}{\sum \text{Kapasitas Fiskal Standarn (KFS)}}$$

$$\text{KF Kabupaten Demak} = \frac{812.416.710.000 / 1.024.934}{40.651,95}$$

$$\text{KF Kabupaten Demak} = \frac{792.652,70}{40.651,95}$$

$$\text{KF Kabupaten Demak} = \text{Rp } 19,49$$

Perhitungan diatas diperoleh besarnya Kapasitas Fiskal Kabupaten demak sebesar Rp 19,49 lebih kecil bila dibandingkan dengan Kapasitas Fiskal Standar Propinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp 40.651,95. Namun apabila besarnya Kapasitas Fiskal dibandingkan Kebutuhan Fiskal maka masih terdapat selisih 128 dari besarnya pengeluaran untuk Kebutuhan Fiskal daerah yang diharapkan dapat ditutup melalui mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat guna membiayai pengeluaran daerah. Kapasitas Fiskal Kabupeten Demak tidak sebanding dengan Kebutuhan fiskalnya, dapat dikatakan jika semakin besar selisih antara kebutuhan

me
tir

fiskal dengan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan maka semakin besar pula alokasi Dana yang diterima dari pusat (Edy Suandy Hamid, 2005).

6.4. Upaya / Posisi Fiskal

Upaya fiskal (*tax effect*) dapat dihitung dengan menggunakan

rumus:

$$UPPAD_j = \frac{PAD_j}{PDRB_j(\text{tanpa migas})}$$

$$UPPAD_j = \frac{17.671.121.260}{80.526.574.000}$$

$$UPPAD_j = 0,2194 \approx 0,219$$

Selanjutnya dihitung tingkat PAD standar (TPADs)

$$TPADs = \frac{\sum 1.491.411.048.000 / 45.605.369.000.000}{\sum 35}$$

$$TPADs = 0,0009 \approx 0,001$$

Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus:

$$IKPAD = \frac{UPPAD}{TPADs} \times 100\%$$

$$IKPAD_j = \frac{0,219}{0,001} \times 100\%$$

$$IKPAD_j = 2,19 \%$$

Perhitungan di atas menunjukkan besarnya IKPADj sebesar 2,19%, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka *tax effect* juga semakin tinggi.

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis Derajat desentralisasi fiskal, Kebutuhan fiskal, Kapasitas fiskal, dan Posisi fiskal Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003 bahwa Kabupaten Demak tingkat kemandiriannya masih rendah hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan masing-masing formula yang digunakan menunjukkan besarnya tingkat ketergantungan dalam pembiayaan daerah. Ketergantungan pemerintah daerah ditunjukkan dengan besarnya Dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat. Besarnya Dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yaitu dengan penyaluran Dana Alokasi Umum.
2. Proporsi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan sebesar 75,09 %. Maka Kabupaten Demak secara jelas masih memiliki ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat untuk menutup pembiayaan belanja daerahnya.

7.2. IMPLIKASI

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mulai dilaksanakan di Indonesia, perlu dilakukan dalam pembaruan beberapa kebijakan atau langkah sebagai berikut:

1. Daerah perlu diberi kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan potensial yang ada di daerah untuk dipungut sendiri oleh daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
2. Sumber-sumber penerimaan yang mobilitasnya rendah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan bisa dialokasikan ke daerah secara penuh (Edy Suandi Hamid, 2005). Pemerintah telah menaruh perhatian pada masalah keadilan dimana daerah yang lebih besar beban regionalnya menerima transfer yang lebih besar pula. Sisi lain dari keadilan ini adalah jumlah penduduk (populasi). Daerah yang populasinya tinggi otomatis menerima transfer lebih besar karena mempunyai beban regional yang lebih besar.
3. Pemerintah seharusnya jeli dalam memantau kenaikan jumlah penduduk sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan kebutuhan, ketidakseimbangan itu ditunjukkan dengan kenaikan dana transfer tidak sebanding dengan tingginya kenaikan pengeluaran belanja daerah.

4. Mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang mengindikasikan sikap over aktif pemerintah daerah terhadap pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangnya. Disisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima pusat. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama pengeluaran rutin. Kencenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, (2002), *Ekonomi Pembangunan, ekonesia* , Yogyakarta.
- Abdul Halim, (2004), *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, *Laporan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah* tahun 2003.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Laporan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah* tahun 2003.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, *PDRB Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *PDRB Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2003*.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, *Jumlah Penduduk Propinsi Jateng Tahun 2003*.
- Baswir, Revrison (1999), *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
- Davey, K.J, (1988), *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek – praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI-Press, Jakarta.
- Edy Suandi Hamid, (2005). *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU); Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*, UII Press; Yogyakarta.
- Irwan dan Suparmoko, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, (edisi keempat), Liberty, Yogyakarta.
- Laporan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Demak tahun Anggaran 2003.
- Lincoln Arsyad, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-2, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.

Michael P todaro, (2002), *Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga*, Jilid I terjemahan Hans Munandar, Erlangga, Jakarta.

Profil Kabupaten Demak tahun 2003, *Demak Dalam Angka 2004*, BPS dan BAPPEDA Kabupaten Demak.

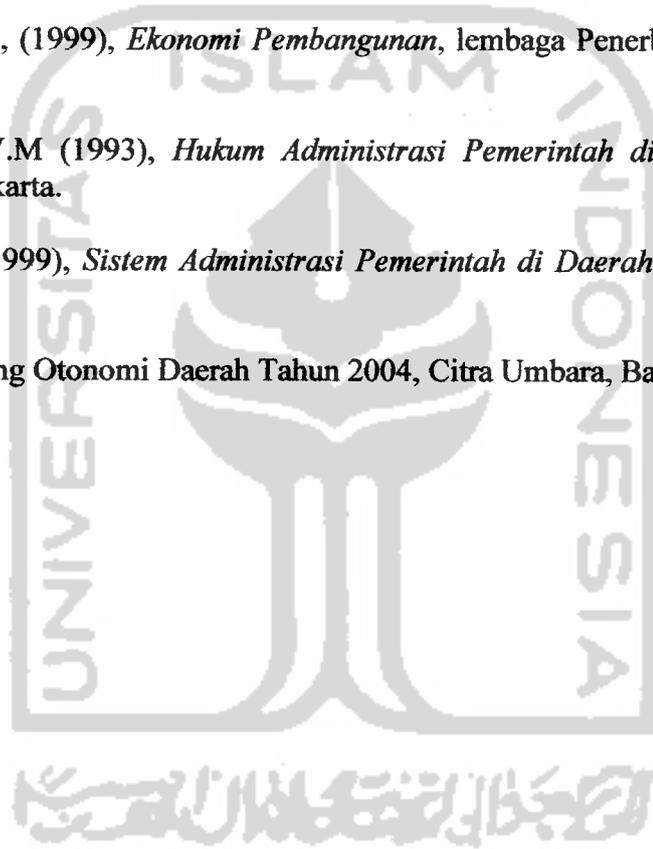
Rizal Sudjarwan, (2005), *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2002*, Skripsi, Yogyakarta.

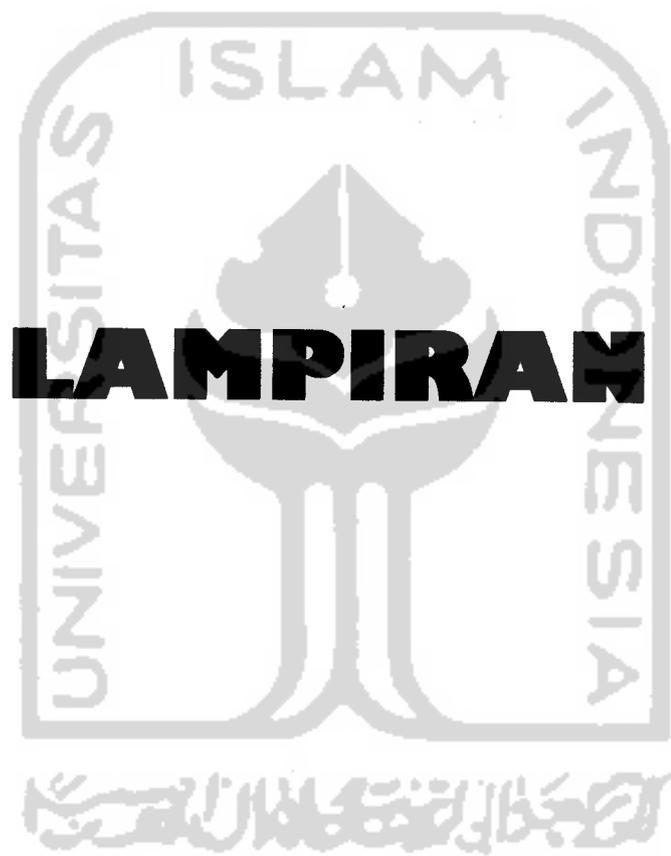
Sadono Sukirno, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, lembaga Penerbit FE UI, Bina Grafik.

Situmorang , V.M (1993), *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bina Grafik, Jakarta.

Supriatmo, T (1999), *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang – Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, Citra Umbara, Bandung.





Tabel. 1.
Realisasi Penerimaan Daerah Otonomi TK I
Tahun Anggaran 2002-2003
Propinsi Jawa Tengah
(Rp 1.000)

JENIS PENERIMAAN 1	Tahun 2002 2	Tahun 2003 3
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan		
Anggaran tahun yang lalu	426,128,434	711,638,349
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	1,090,488,923	1,491,411,048
2.1. Pajak Daerah	871,000,000	1,092,112,089
2.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor	358,005,063	448,888,241
2.1.2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor	502,682,581	630,293,598
2.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10,312,356	12,930,250
2.1.4. Pajak lainnya		
2.2. Retribusi Daerah	106,508,199	217,044,727
2.2.1. Retribusi Jasa Umum	97,744,136	211,735,871
2.2.1.1. Retribusi pelayanan Kesehatan	89,275,066	193,389,953
2.2.1.2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8,469,070	18,345,198
2.2.1.3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-
2.2.1.4. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	-	-
2.2.2. Retribusi Jasa Usaha	7,724,147	3,080,129
2.2.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,567,468	625,053
2.2.2.2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	4,853,409	1,935,376
2.2.2.3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,070,757	426,982
2.2.2.4. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/IV	232,513	92,718
2.2.2.5. Retribusi Pengolahan limbah cair	-	-
2.2.2.6. Retribusi tempat pendaratan kapal	-	-
2.2.2.7. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	-	-
2.2.2.8. Retribusi penyeberangan di atas air	-	-
2.2.3. Retribusi perizinan tertentu	1,039,916	2,228,727
2.2.3.1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	-	-
2.2.3.2. Retribusi Izin Trayek	1,039,916	2,228,727
2.3. Bagian Laba Usaha Daerah	7,724,147	6,899,838
2.3.1. Bank Pembangunan daerah	3,862,074	3,449,919
2.3.2. Perusahaan Daerah Air Minum	-	-
2.3.3. Perusahaan Daerah Lainnya	460,040	410,945
2.3.4. Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan	-	-
2.3.5. Lain-lain	3,402,033	3,038,974
2.4. Penerimaan Lain-lain	105,256,577	175,354,394
2.4.1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	1,170,190	1,949,502
2.4.2. Penjualan Barang-barang Bekas	-	-
2.4.3. Cicilan Kendaraan Bermotor	-	-

BPS Jateng Statistik Keuangan Jateng
BPS Jateng Statistik Keuangan Jateng

JENIS PENERIMAAN 1	Tahun 2002 2	Tahun 2003 3
2.4.4. Cicilan Rumah Dinas	969,184	1,614,632
2.4.5. Jasa Giro	18,196,985	30,315,648
2.4.6. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	17,236	28,715
2.4.7. Sumbangan Pihak Ketiga	11,419,354	19,024,312
2.4.8. Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	-	-
2.4.9. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan D	3,149	5,246
2.4.10. Setoran Cicilan Hutang	-	-
2.4.11. Setoran Biaya Pembinaan Yang Diberikan Pemerintah	-	-
2.4.12. Sewa Bangunan dan Tanah Milik Pemerintah D	-	-
2.4.13. Sewa Rumah Dinas	-	-
2.4.14. Jasa Giro Khusus	-	-
2.4.15. Penerimaan Bunga Deposito	-	-
2.4.16. Penerimaan Lain Yang Belum Termasuk di Atas	73,480,479	122,416,339
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Yang Lebih Tinggi/ Bagian Pendapatan Perimbangan	740,725,954	661,191,950
3.1. Bagi Hasil Pajak	148,500,000	195,711,661
3.1.1. Pajak Bumi dan Bangunan	68,313,407	90,031,854
3.1.2. Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	12,088,226	15,931,359
3.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-
3.1.4. Bagi Hasil Pajak Lainnya	698,098,367	89,748,448
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	8,933,146	10,953,985
3.2.1. Iuran Hasil Hutan	-	-
3.2.2. Iuran Hasil Pengusahaan Hutan	1,372,518	1,683,007
3.2.3. Pembierian Hak Atas Tanah Negara	-	-
3.2.4. Landrent	6,861,799	8,414,062
3.2.5. Penerimaan Dari Iuran Eksplorasi/ Iuran Eksploitasi	290,815	356,602
3.2.6. Pungutan Masuk Taman Hutan Wisata	-	500,314
3.2.7. Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	408,014	-
3.3. Subsidi Daerah Otonom	480,774,941	0
3.3.1. Subsidi Belanja Pegawai	-	-
3.3.2. Subsidi Belanja Non Pegawai	-	-
3.3.3. Sumbangan Lainnya Dari Pemerintah Pusat	-	-
3.4. Bantuan Pembangunan	102,517,867	0
3.4.1. Bantuan Pembangunan Dati II	-	-
3.4.2. Bantuan Lainnya	102,517,867	0
3.5. Dana Alokasi Umum (DAU)	-	356,840,933
3.6. Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-
3.6.1. Dana Reboisasi	-	-
3.7. Penerimaan Lainnya	-	97,685,371
3.7.1. Dana Darurat Bencana Alam	-	-

JENIS PENERIMAAN 1	Tahun 2002 2	Tahun 2003 3
3.7.2. Dana Bantuan Umum	-	-
3.7.3. Dana Bantuan Khusus	-	-
3.7.4. Penerimaan Dari Daerah Lain Dalam Rangka KeL	-	-
3.7.5. Penerimaan Lain-lain	-	97,685,371
4. Pinjaman Pemerintah Pusat	-	-
4.1. Pinjaman Dalam Negeri	-	-
4.2. Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
TOTAL PENERIMAAN	2,257,343,311	2,864,241,347
BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	34,883,096	27,590,515
1. Iuran Wajib Pegawai	24,550,000	21,360,951
2. Potongan Beras	-	5,091,212
3. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	8,794,444	1,138,352
4. Penerimaan Amal Bakti KORPRI	-	-
5. Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	1,538,652	-
6	-	-
7	-	-
8. Lain-lain	-	-

BPS Jateng Statistik Keuangan Jateng

TABEL 2.
REALISASI PENGELUARAN DAERAH OTONOMI TKI
TAHUN ANGGARAN 2002-2003
PROPINSI JAWA TENGAH
(Rp 1.000)

JENIS PENGELUARAN 1	Tahun 2002 2	Tahun 2003 2
I. PENGELUARAN RUTIN	1,263,236,599	1,288,987,142
1. Belanja Pegawai	313,669,951	213,571,781
2. Belanja Barang	208,293,752	253,626,469
3. Belanja Pemeliharaan	44,275,463	31,974,531
4. Belanja Perjalanan Dinas	17,097,121	22,163,568
5. Belanja Lain-lain	143,110,230	161,081,933
6. Angsuran Pinjaman/ Hutang & Bunga	958,638	889,043
7. Ganjaran Subsidi & Sumbangan Kepada Daerah Bawahan/Bantuan Keuangan	373,682,707	400,111,443
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	122,176,999	155,596,636
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	39,971,738	49,971,738
II. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	883,596,809	1,144,619,841
1. Industri	22,037,197	24,171,250
2. Pertanian Dan Kehutanan	56,548,793	72,100,403
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	77,408,257	101,370,463
4. Tenaga Kerja	7,679,564	7,679,564
5. Perdagangan , Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	140,471,974	230,908,780
6. Transportasi	176,780,490	266,448,584
7. Pertambangan Dan Energi	2,162,613	2,329,981
8. Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	6,671,628	8,085,270
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	12,288,600	19,556,229
10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	3,603,000	4,049,782
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	72,121,843	75,355,342
12. Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	223,700	223,700
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan Remaja	77,238,574	86,784,902
14. Perumahan dan Pemukiman	6,484,841	6,484,841
15. Agama	30,862,856	38,444,681
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1,287,719	1,149,652
17. Hukum	1,623,000	2,445,484
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	84,574,321	94,243,478
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	3,324,419	3,674,035
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	5,128,000	5,128,000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	93,985.42	93,985,420
TOTAL PENGELUARAN	2,146,833,408	2,433,606,983
III. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP) RUTIN	34,883,096	27,590,515
IV. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP) PEMB	-	-

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI JAWA TENGAH
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 1993, MENURUT PENGGUNAAN (JUTA Rp)
Gross Regional Domestic Product of Central Java
at Current and Constant 1993 by Expenditure
2000 - 2003 (Million Rp)

	PENGGUNAAN/EXPENDITURE	2000	2001	2002*)	2003**)
	1	2	3	4	5
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Private Consumption Expenditure</i>	63,596,259	75,219,927	90,791,705	99,487,281
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba / <i>Private Non Profit Institution Consumption Expenditure</i>	1,945,484	2,307,123	2,854,643	2,937,021
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>General Government Consumption Expenditure</i>	17,321,710	18,389,269	21,407,908	24,090,224
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto / <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	20,260,966	23,638,266	26,711,897	30,719,051
5	Perubahan Stok / <i>Change in Stocks</i>	(2,216,071)	(15,266,045)	(14,926,793)	(12,229,675)
6	Ekspor Barang dan Jasa / <i>Export of Goods and Services</i>	69,145,145	77,735,667	76,460,393	81,272,862
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa / <i>Less Import of Goods and Services</i>	52,270,569	45,892,727	46,881,452	51,171,105
	JUMLAH / TOTAL	117,782,925	136,131,480	156,418,300	175,105,659
	ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Private Consumption Expenditure</i>	26,410,189	27,006,349	28,196,590	29,339,002
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba / <i>Private Non Profit Institution Consumption Expenditure</i>	1,006,511	1,064,012	1,091,942	1,066,495
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>General Government Consumption Expenditure</i>	6,846,598	7,084,099	7,213,879	7,706,429
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto / <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	6,567,385	6,929,441	7,145,275	7,496,108
5	Perubahan Stok / <i>Change in Stocks</i>	(3,567,222)	(7,185,893)	(6,032,326)	(6,102,727)
6	Ekspor Barang dan Jasa / <i>Export of Goods and Services</i>	22,017,447	21,991,428	20,277,605	21,245,484
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa / <i>Less Import of Goods and Services</i>	18,339,240	14,584,260	14,117,272	15,145,421
	JUMLAH / TOTAL	40,941,667	42,305,176	43,775,693	45,605,369

Catatan: **) Angka Sangat Sementara/First Preliminary Figures

*) Angka Sementara/Second Preliminary Figures

**Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Jawa Tengah, 2003**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan					
		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
		Banyaknya	%	Banyaknya	%	Banyaknya	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Cilacap	820.238	49,96	821.611	50,04	1.641.849	100,00
2	Kab. Banyumas	746.142	49,70	755.228	50,30	1.501.370	100,00
3	Kab. Purbalingga	422.059	49,83	424.865	50,17	846.924	100,00
4	Kab. Banjarnegara	457.288	51,71	427.065	48,29	884.353	100,00
5	Kab. Kebumen	589.265	49,36	604.585	50,64	1.193.850	100,00
6	Kab. Purworejo	357.810	50,44	351.587	49,56	709.397	100,00
7	Kab. Wonosobo	386.594	50,93	372.424	49,07	759.018	100,00
8	Kab. Magelang	571.290	50,00	571.177	50,00	1.142.467	100,00
9	Kab. Boyolali	44.362	48,00	481.360	52,00	925.722	100,00
10	Kab. Klaten	547.072	48,83	573.328	51,17	1.120.400	100,00
11	Kab. Sukoharjo	395.760	49,00	411.875	51,00	807.635	100,00
12	Kab. Wonogiri	484.385	48,21	520.337	51,79	1.004.722	100,00
13	Kab. Karanganyar	400.581	49,34	411.296	50,66	811.877	100,00
14	Kab. Sragen	431.567	50,18	428.419	49,82	859.986	100,00
15	Kab. Grobogan	660.644	50,85	638.531	49,15	1.299.175	100,00
16	Kab. Blora	405.074	49,00	421.628	51,00	826.702	100,00
17	Kab. Rembang	287.335	49,85	289.082	50,15	576.417	100,00
18	Kab. Pati	589.712	49,65	597.934	50,35	1.187.646	100,00
19	Kab. Kudus	366.622	49,65	371.788	50,35	738.410	100,00
20	Kab. Jepara	521.905	50,44	512.894	49,56	1.034.799	100,00
21	Kab. Demak	508.703	49,63	516.231	50,37	1.024.934	100,00
22	Kab. Semarang	441.015	50,13	438.770	49,87	879.785	100,00
23	Kab. Temanggung	344.564	49,59	350.328	50,41	694.892	100,00
24	Kab. Kendal	446.610	50,63	435.535	49,37	882.145	100,00
25	Kab. Batang	348.758	50,36	343.761	49,64	692.519	100,00
26	Kab. Pekalongan	416.789	50,22	413.195	49,78	829.984	100,00
27	Kab. Pemalang	643.085	48,83	673.892	51,17	1.316.977	100,00
28	Kab. Tegal	708.411	49,56	720.934	50,44	1.429.345	100,00
29	Kab. Brebes	901.585	51,12	861.996	48,88	1.763.581	100,00
71	Kab. Magelang	58.160	48,71	61.240	51,29	119.400	100,00
72	Kab. Surakarta	231.058	47,59	254.443	52,41	485.501	100,00
73	Kab. Salatiga	77.983	49,32	80.129	50,68	158.112	100,00
74	Kab. Semarang	692.422	49,84	696.994	50,16	1.389.416	100,00
75	Kab. Pekalongan	132.662	48,88	138.756	51,12	271.418	100,00
76	Kab. Tegal	119.902	49,52	122.210	50,48	242.112	100,00
Jumlah		15.957.412	49,81	16.095.428	50,19	32.052.840	100,00

TABEL 1.3
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2003
(Rp 1.000)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI ANGGARAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN	<u>319.201.301,720</u>	<u>327.518.002,152</u>	<u>8.316.700,432</u>	102.61%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	17,511,323,490	17,671,121,260	<u>159,797,770</u>	100.91%
1.1.1	Pajak Daerah	4,429,670,750	4,857,931,265	428,260,515	109.67%
1.1.2	Retribusi Daerah	7,755,513,740	7,350,203,487	(405,310,253)	94.77%
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	332,787,000	249,018,000	(83,769,000)	74.83%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4,993,352,000	5,213,968,508	220,616,508	104.42%
1.2	Dana Perimbangan	281,915,978,230	289,942,431,653	<u>8,026,453,423</u>	102.85%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11,782,647,630	19,165,601,959	7,382,954,329	162.66%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	245,940,000,000	245,940,000,000	-	100.00%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8,900,000,000	8,900,000,000	-	100.00%
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	15,293,330,600	15,936,829,694	643,499,094	104.21%
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>19,774,000,000</u>	<u>19,904,449,239</u>	<u>130,449,239</u>	100.66%
	Total Pendapatan	<u>319.201.301,720</u>	<u>327.518.002,152</u>	<u>8.316.700,432</u>	102.61%

Kantor Dinas BPKKD Kab. Demak

TABEL 1.3
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2003
(Rp 1.000)

1	2	3	4	5	6
II	BELANJA	<u>339,415,755,637</u>	<u>327,643,100,953</u>	<u>(11,772,654,684)</u>	96.53%
2.1	APARATUR DAERAH	60,755,328,082	55,897,304,921	(4,858,023,161)	92.00%
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	45,222,395,445	41,957,291,224	(3,265,104,221)	92.78%
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	34,196,136,095	31,655,711,503	(2,540,424,592)	92.57%
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,782,107,150	5,261,487,813	(520,619,337)	91.00%
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,106,815,000	1,037,070,000	(69,745,000)	93.70%
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	1,707,837,200	1,670,324,523	(37,512,677)	97.80%
2.1.1.5	Belanja Lain-lain	2,429,500,000	2,332,697,385	(96,802,615)	96.02%
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	9,447,022,912	8,677,026,737	(769,996,175)	91.85%
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	2,064,364,062	1,627,033,869	(437,330,193)	78.82%
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,851,286,850	4,664,113,703	(187,173,147)	96.14%
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,600,165,000	1,468,645,500	(131,519,500)	91.78%
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	931,207,000	917,233,665	(13,973,335)	98.50%
2.1.3	Belanja Modal	6,085,909,725	5,262,986,960	(822,922,765)	86.48%
2.2	PELAYANAN PUBLIK	221,323,456,694	216,661,467,701	(4,661,988,993)	97.89%
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	140,168,605,944	135,804,277,337	(4,364,328,607)	96.89%
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	125,965,785,044	122,411,326,170	(3,554,458,874)	97.18%
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,190,928,900	8,415,672,923	(775,255,977)	91.56%
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	156,070,000	146,230,000	(9,840,000)	93.70%
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	1,683,822,000	1,712,812,244	28,990,244	101.72%
2.2.1.5	Belanja Lain-lain	3,172,000,000	3,118,236,000	(53,764,000)	98.31%
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	60,805,268,000	60,786,904,254	(18,363,746)	99.97%
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	5,278,113,500	5,036,957,452	(241,156,048)	95.43%
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,842,290,000	17,193,706,757	351,416,757	102.09%
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,146,001,300	1,202,264,000	56,262,700	104.91%
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	37,538,863,200	37,353,976,045	(184,887,155)	99.51%
2.2.3	Belanja Modal/Pembangunan	20,349,582,750	20,070,286,110	(279,296,640)	98.63%
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	29,815,417,080	29,479,148,331	(336,268,749)	98.87%
2.4	Belanja Tak Tersangka	27,521,553,781	25,605,180,000	(1,916,373,781)	93.04%
	Total Belanja	<u>339,415,755,637</u>	<u>327,643,100,953</u>	<u>(11,772,654,684)</u>	96.53%
	Surplus/(Defisit)	(20,214,453,917)	(125,098,801)	20,089,355,116	0.62%

TABEL 1.3
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2003
(Rp 1.000)

III	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Daerah	<u>51.296.741.081</u>	<u>51.458.979.453</u>	<u>162.238.372</u>	100.32%
3.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	33,161,953,917	33,161,953,917	-	100.00%
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan				
3.1.3	Transfer dari Dana Depresiasi				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	1,531,500,000	1,746,950,000	215,450,000	114.07%
3.1.5	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.6	Pos Penerimaan PFK	16,603,287,164	16,550,075,536	(53,211,628)	99.68%
	Jumlah Penerimaan Daerah	<u>51.296.741.081</u>	<u>51.458.979.453</u>	<u>162.238.372</u>	100.32%
3.2	Pengeluaran Daerah	<u>31.082.287.164</u>	<u>51.333.880.652</u>	<u>20.251.593.488</u>	165.15%
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal	12,725,000,000	12,725,000,000	-	100.00%
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	20,304,805,116	20,304,805,116	
3.2.5	Pemberian Pinjaman	1,754,000,000	1,754,000,000	-	100.00%
3.2.6	Pos Pengeluaran PFK	16,603,287,164	16,550,075,536	(53,211,628)	99.68%
	Total Pengeluaran Pembiayaan	<u>31.082.287.164</u>	<u>51.333.880.652</u>	<u>20.251.593.488</u>	165.15%
	Pembiayaan Netto	<u>20.214.453.917</u>	<u>125.098.801</u>	<u>(20.089.355.116)</u>	0.62%

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993

TAHUN 2002 – 2004

(Rp 1.000)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	347 673.86	364 677.11	372 974.54
1.1. Tanaman Bahan Makanan	254 540.80	268 323.30	280 989.34
1.2. Tanaman Perkebunan	13 841.70	14 028.55	9 978.52
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	23 215.70	24 935.80	25 969.09
1.4. Kehutanan	25 262.25	25 513.73	18 579.47
1.5. Perikanan Laut dan Darat	30 813.42	25 513.73	18 579.47
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	2 019.80	2 065.09	2 111.97
3. INDUSTRI	91 211.82	91 355.39	94 461.47
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	5 355.02	5 085.88	6 283.13
5. BANGUNAN	22 852.49	23 354.55	24 108.90
6. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	160 043.86	161 652.23	163 532.87
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI			
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN	34 118.02 27 209.13	34 903.73 27 529.44	35 417.49 28 103.21
9. JASA-JASA	99 719.04	101 793.29	113 081.62
Produk Domestik Regional Bruto	790 203.04	812 416.71	840 075.22
Jumlah Penduduk (Orang)	996 384	1 028 312	1 025 314
PDRB Per Kapita (Rupiah)	793 071	790 049	819 335

Sumber : BPS Kabupaten Demak " Demak Dalam Angka 2004 "